

BANTUAN FOR NTT Donasi Pemkot Tembus Rp 131 Juta

GORONTALO -GP- Kepedulian aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengalir. Hingga Senin (24/8/2026), total donasi yang dihimpun melalui Pemerintah Kota Gorontalo telah mencapai Rp131 juta.



Adhan Dambea

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp76 juta telah disalurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di NTT. Sementara Rp 55 juta lainnya masih dalam proses penyaluran.

■ Bersambung ke Hal.2

KARHUTLA 72 Orang Jadi Tersangka

JAKARTA -GP- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan sekitar 72 orang sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Penetapan tersangka dilakukan oleh jajaran kepolisian di 9 Polda.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan, penegakan hukum menjadi salah satu fokus pemerintah di tengah penanganan karhutla yang masih berlangsung.

"Ini tidak bisa kita tolerir, oleh karena itu penegakan hukum harus dilakukan," tegas Jumhur dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/8/2026).

■ Bersambung ke Hal.2



Oleh: Dahlan Iskan



-FOTO: BOY SLAMET-HARIAN DISWAY-

SUASANA hari kedua Gathering Perusuh Disway di DIC Farm, Pacet, Mojokerto. Meja yang terlihat di foto ini terbuat dari kayu randu.

Networking Rebahan

SAYA seperti jadi tertuduh di "muktamar" Gondang, dekat Pacet (Lihat Disway kemarin: Bintang Perusuh). Padahal awalnya saya hanya ingin sedikit merendah: "Di DIC Farm ini tidak ada barang mahal. Meja panjang ini misalnya, terbuat dari jenis kayu yang kalau dijual pun tidak ada yang beli."

"Kayu apa?" tanya seorang "Perusuh" Disway. "Kayu ini dulu waktu di pondok dipakai untuk bantal para santri. Kayu randu."

■ Bersambung ke Hal.2

PAHLAWAN NASIONAL

HB JASSIN - ALOEI SABOE MASUK MEJA DEWAN GELAR

JAKARTA - Usulan gelar Pahlawan Nasional untuk dua tokoh asal Gorontalo, Hans Bague (HB) Jassin, dan Prof. Dr. dr. Aloei Saboe, kini masuk ke tahap penilaian pemerintah pusat. Dokumen pengusulan kedua tokoh tersebut diserahkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Jakarta, Senin (24/8).

■ Bersambung ke Hal.2

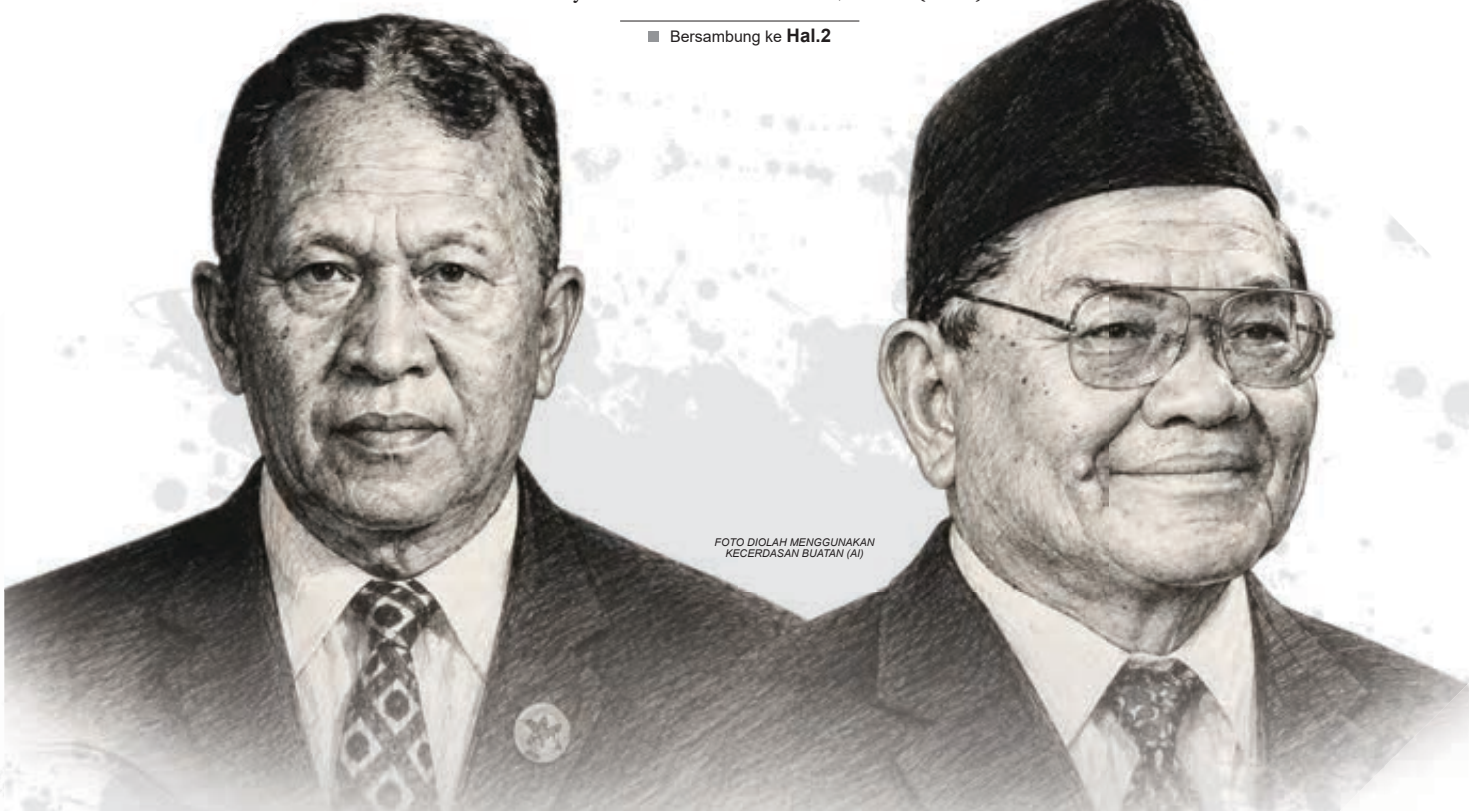


FOTO DIOLAH MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN (AI)

Prof. Dr. dr. H. Aloei Saboe

Lahir: Gorontalo, 11 November 1911,
Wafat: Bandung, 31 Agustus 1987

- Menyelesaikan pendidikan kedokteran di Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS), Surabaya (Saat ini fakultas Kedokteran Universitas Airlangga).
- Mendirikan fasilitas kesehatan di Toto, Kabila, yang kemudian menjadi rumah sakit khusus kusta pada tahun 1942
- Terlibat dalam gerakan perjuangan di Gorontalo, termasuk lingkungan perjuangan Nani Wartabone, dan tercatat keterlibatannya dalam perjuangan melawan Belanda, hingga operasi menghadapi Permesta pada 1958.
- Pernah menjadi anggota Konstituante Republik Indonesia 1957-1959
- Guru besar bidang Public Health di Universitas Padjadjaran Bandung

Prof. Hans Bague Jassin

Lahir: Gorontalo, 31 Juli 1917
Wafat: Jakarta, 11 Maret 2000

- HB Jassin bersekolah di HIS Gorontalo, kemudian HBS di Medan. Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan lulus pada 1957. Ia kemudian memperdalam ilmu perbandingan sastra di Universitas Yale, Amerika Serikat, pada 1958-1959.
- Dikenal sebagai kritikus sastra, pengarang, penyunting, penerjemah, akademisi sekaligus dokumentator sastra Indonesia. Ia mendapat julukan "Paus Sastra Indonesia"
- Perjuangan HB Jassin adalah kebudayaan dan ingatan bangsa. Jassin bekerja pada bidang yang sering tidak terlihat: menjaga agar karya, pemikiran dan jejak para sastrawan Indonesia tidak hilang.
- Puncak kerja dokumentasinya kemudian melahirkan Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin (PDS HB Jassin), yang kini berada di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dan tetap menjadi salah satu pusat rujukan penting bagi penelitian sastra Indonesia.

SUMBER: DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER

TARGET PRABOWO TIGA TAHUN

Indonesia Stop Impor Minyak-LPG

JAKARTA -GP- Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak boleh lagi mengimpor minyak maupun LPG dalam tiga tahun untuk memperkuat kemandirian energi nasional, didukung dengan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa.

"Kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, Insyaallah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi," kata Prabowo dikutip dari tayangan resmi Sekretariat Presiden secara daring di Jakarta.

Prabowo menyampaikan target tersebut harus didukung dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW), geothermal, pengembangan ladang gas serta peningkatan lifting minyak nasional.



(ANTARA/YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN/FATHUR ROCHMAN)

PRESIDEN Prabowo Subianto berpidato dalam peluncuran dan peletakan batu pertama program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

■ Bersambung ke Hal.2

HB Jassin - Aloei Saboe Masuk Meja Dewan Gelar

dari halaman 1

Penyerahan berlangsung di Kantor Kementerian Kebudayaan, Kompleks Kemendikbud, Senayan. Fadli Zon juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang menangani proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional. Setelah berkas diterima, usulan akan melalui verifikasi di tingkat pusat, baik dari sisi administrasi maupun substansi. Penilaian selanjutnya dilakukan Dewan Gelar dengan melibatkan sejarawan dan ahli terkait. Hasil penilaian Dewan Gelar kemudian menjadi rekomendasi kepada Presiden. Keputusan akhir mengenai penganugerahan

gelar Pahlawan Nasional berada di tangan Presiden RI. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pengusulan HB Jassin dan Aloei Saboe telah melalui proses penelitian di tingkat daerah. Pemerintah Provinsi Gorontalo melibatkan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk menyiapkan kajian serta dokumen persyaratan. HB Jassin dikenal sebagai kritikus dan dokumentator sastra Indonesia. Tokoh kelahiran Gorontalo itu memiliki pengaruh besar dalam perkembangan kritik dan dokumentasi kesusastraan Indonesia. Sementara Aloei Saboe dikenal sebagai dokter sekaligus tokoh perjuangan di bidang

kesehatan. Kiprahnya berlangsung pada masa perjuangan dan periode awal pembangunan kesehatan di Indonesia. Dua jalur pengabdian tersebut menjadi dasar Gorontalo mengusulkan keduanya sebagai Pahlawan Nasional”HB Jassin melalui bidang sastra dan kebudayaan, sedangkan Aloei Saboe melalui perjuangan serta pengabdian di bidang kesehatan. Kini, kelayakan kedua nama tersebut berada di meja pemerintah pusat. Penyerahan dokumen menjadi awal dari proses penilaian, bukan akhir perjuangan untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. (tro)

Donasi Pemkot Tembus Rp 131 Juta

dari halaman 1

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo, Hendry Ticoalu, mengatakan dana yang telah disalurkan merupakan bagian dari donasi yang terkumpul hingga Rabu (19/8/2026). “Yang sudah kami salurkan Rp76 juta. Itu yang terkumpul hingga Rabu (19/8/2026). Sementara yang belum tersalurkan sekitar Rp 55 juta. Besok saya akan konsultasi dengan pak wali untuk penyaluran tahap dua,” kata Hendry. Menurutny, donasi tersebut mayoritas bersumber dari ASN di lingkungan Pemkot Gorontalo. Penggalangan dana itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang disampaikan saat pesta rakyat dalam rangka

memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu, Wali Kota Adhan meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) segera membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Bersamaan dengan itu, Wali Kota Adhan mengajak seluruh ASN menyisihkan sebagian kecil penghasilan mereka untuk membantu korban bencana di NTT. “Pak Wali Kota menginstruksikan agar seluruh ASN menyisihkan Rp2.000 per ASN dari TPP yang diterima untuk disumbangkan kepada korban bencana NTT,” jelas Hendry. Gerakan kemanusiaan tersebut kemudian mendapat respons dari berbagai pihak. Selain donasi ASN, sejumlah pihak lainnya turut menyerahkan bantuan melalui Pemkot Gorontalo untuk kemudian diteruskan

Networking Rebahan

dari halaman 1

“Oh, ini yang membuat pohon randu kian langka,” ujar perusuh itu. Di DIC Farm dulunya memang tumbuh beberapa kayu randu. Di pinggir-pinggir batas tanah. Sejak saya mulai menengok lahan ini di masa Covid-19, pohon randunya tinggal dua batang. Dua-duanya besar. Tinggi. Daunnya sudah meranggas tua. Di sebelah barat pohon itu terhampar sawah. Berarti penyinaran matahari pagi untuk padinya kurang sempurna. Terhalang pohon. Ditebang. Yang menebang bingung: kayunya dibuang ke mana. Tidak laku dijual. Tidak bisa pula untuk kayu bakar. Lalu saya putuskan untuk dijadikan meja. Dianggap nyeleneh: meja dari kayu randu. Tentu ketebalannya saya buat 20 cm. Agar tidak “molet” seperti “perusuh” yang malas bangun pagi. Lalu permukaannya disapu dengan api yang disemprotkan dari tabung api. Diberi warna kayu. Bentuk mejanya tidak harus persis segi empat. Pinggirannya tidak harus lurus: ikut lekukan pohon saja. Itulah meja utama yang dipakai bermuktamar perusuh kemarin itu. Meja randu itu ditaruh di kolong ”rumah Manado”: rumah kayu yang dulu didatangkan dari Tomohon. Bawah untuk muktamar, atas untuk tidur “perusuh” wanita. Tidak semuanya. Ada yang membawa kemah pramuka. Empat orang. Mereka pasang kemah di lapangan basket mini di sebelah rumah Manado. “Lebih nyaman dari tahun lalu. Tidak ada hujan. Lokasi ini sudah begitu banyak berubah. Lebih cantik,” ujarnya di depan tendanyi. Saya pun minta maaf telah membuat pohon randu kian langka. Nama orang yang menuduh saya itu Anda sudah tahu: Sumhaji. Ia kelahiran Konawe, Sulawesi, tapi asal-usulnya dari Batu, Malang. Ayahnya menjadi transmigran di masa nan silam. Sumhaji benar-benar merasakan kian sulit mencari kapuk dari pohon randu. Untuk apa? “Saya ini eksporter kapuk randu. Ekspor sampai Eropa,” ujar Sumhaji. Dulu, pohon randu banyak ditanam di pinggir-pinggir jalan. “Ketika jalan jalan dilebarkan habislah pohon randu,” katanya. Kini Sumhaji mencari kapuk randu sampai ke Sumbawa. Di Eropa kapuk randu juga untuk bantal. Atau kasur. Tidak ada guling di sana. Guling tidak dikenal di budaya barat. Guling lahir di zaman Belanda menjajah Indonesia. Mereka datang tanpa istri. Malam-malam tidak ada yang dipeluk. Dibuatlah guling. Sejak itu guling punya terjemahan dalam bahasa Inggris: Dutch wife -itu terjemahan unik yang bisa dipercaya: ngawurnya.



Bantal dari kapuk randu pun kini kian langka. Digantikan poliester atau bulu angsa. “Di Eropa bantal dari kapuk randu naik daun lagi. Yakni sejak ada gerakan menyayangi binatang,” ujar Sumhaji. Saya sendiri sudah lupa kapan terakhir pakai bantal kapuk randu. Kenangan saya pada bantal kapuk adalah kenangan buruk: banyak kutunya. Kutu busuk pula. Maka pekerjaan tambahan sebagai anak-anak adalah mencari kutu yang bersarang di pojok-pojok bantal: di jahitannya. Di situ pula kutu busuk bertelur dan beranak sehingga sangat sulit memberantasnya. Saya lupa kenapa belakangan kutu busuk seperti tiba-tiba lenyap di jagat bantal nusantara. Tanpa muktamar ini saya tetap akan mengira sudah tidak ada lagi orang yang cari penghidupan dari kapuk randu. Ternyata masih jadi bisnis yang mengasikkan dolar. Sumhaji pun saya ajak podcast bersama Sasa di Dismorning Minggu pagi lalu. Di situ Sumhaji berani menyebut diri sebagai “profesor kapuk”. Ia memang ahli di bidang kapuk randu. “Di musim panas kapuk randu terasa lebih dingin. Di musim dingin terasa lebih hangat,” katanya. Di masa kecil tidak ada istilah beli bantal. Bantal bisa dibuat sendiri: pakai kain sarung yang sudah diafikir. Sudah sobek sana-sini. Lalu diisi kapuk yang diambil dari pohon. Setiap mencari kapuk randu selalu dapat bonus: biji randu. Warnanya hitam. Sekecil butiran kedelai. Digoreng tanpa minyak. Saya masih ingat rasanya tapi sudah agak-agak lupa namanya. Klentheng?

Selain Sumhaji ada lagi perusuh yang saya ajak ngobrol panjang: Ahmad Reza Ropi. Nama tambahan Ropi itu dari saya: agar saya ingat Reza yang perusuh ini adalah Reza yang menemukan bisnis berkat bertemu direktur rumah sakit. Sang direktur lagi berpikir bagaimana agar rumah sakit yang ia pimpin tidak didominasi aroma obat. Agar pasien tidak jenuh dengan aroma itu. Sang direktur terkesan setiap lewat dekat toko Roti O hidungnya terasa nyaman: menghirup aroma roti yang harum enak. Reza langsung seperti dapat ilham: “Bisa, Pak,” jawabnya. Dari situlah Reza menciptakan roti aroma kopi. Roti Kopi -Ropi. Jadilah Ropi merk roti buatannya. Kebetulan sang istri adalah cucu pembuat roti di zaman Belanda. Dia masih menyimpan resepnya. Kini Reza sudah mempunyai 130 outlet Ropi di 130 rumah sakit tipe C. Ia tidak masuk RS kelas atas karena mereka punya cara sendiri menghilangkan aroma obat di rumah sakitnya. Ke muktamar Reza membawa beberapa contoh Ropi. Ditaruh di depan saya. Dalam sekejap saya sudah tidak sempat merasakan enak-tidaknya. Reza tidak membawa banyak Ropi karena roti resmi muktamar ini adalah Dea (Disway 26 Oktober 2025: Garis Kemampuan). Begitulah serunya. Di muktamar ini saya pun melihat: waktu kosong lebih penting dari waktu ada acara. Karena itu acara-acara dibuat singkat-singkat: agar waktu kosong lebih banyak. Saya lihat mereka aktif saling networking di waktu kosong. Tidak ada yang hanya rebahan. (*)

72 Orang Jadi...

dari halaman 1

Selain terhadap individu, KLH/BPLH juga tengah mengintensifkan investigasi terhadap korporasi yang area konsesinya terbakar. Pemerintah menyiapkan sejumlah sanksi, mulai dari sanksi administratif, gugatan perdata, tuntutan ganti rugi lingkungan hingga pembebanan biaya pemulihan ekosistem. Juhur menegaskan, pemerintah tidak akan berkompromi terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Di sisi lain, pemerintah terus mengerahkan berbagai kekuatan untuk memadamkan titik api. Penanganan dilakukan bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/ lembaga, BNPB, BMKG, TNI, Polri, hingga masyarakat. “Jadi saya hadir di beberapa tempat, termasuk sekarang di Kalsel atas perintah Bapak Presiden untuk memastikan koordinasi-koordinasi di lapangan berjalan dengan baik,” ujarnya. Ia menilai, prioritas pertama pemerintah adalah memastikan seluruh titik api dapat dipadamkan untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Selain pemadaman, pemerintah juga memprioritaskan perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan asap. Mitigasi dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan di daerah. “Dan yang kedua, prioritas kita adalah agar masyarakat terlindungi dan tidak terdampak secara serius, termasuk Kementerian Kesehatan dengan Puskesmas dan sebagainya juga bergotong royong,” ucap dia. Juhur mengatakan, upaya mitigasi menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data BNPB, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan pada 2023 mencapai sekitar 190.000 hektare. Sementara saat ini, luas kebakaran tercatat sekitar 8.000 hektare. “Kita berharap angka ini tidak meluas bahkan jangan sampai mendekati angka tahun 2023, artinya sebenarnya ada keberhasilan mitigasi sebelum bencana, dan kita juga akan terus berusaha mengatasi semuanya dengan seluruh pihak,” katanya. (net)

Indonesia Stop...

dari halaman 1

Menurut Prabowo, program PLTS 100 GW merupakan bagian dari upaya membangun Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW tersebut dapat direalisasikan dalam waktu tiga tahun, hampir setara dengan total kapasitas listrik nasional saat ini yang berada di angka 88 GW dari seluruh sumber energi. “Untuk sebagai bayangan, seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt dari batu bara, minyak, gas, hingga geothermal. Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun,” kata Prabowo. (antara)



Salurkan Infak Dan Waqaf Terbaik Kita Untuk Pembangunan

GORONTALO ISLAMIC CENTRE

DI BANK MUAMALAT

NO REK : 8120999999



LAPORAN KEUANGAN

MASJID RAYA- GORONTALO ISLAMIC CENTRE

Saldo tanggal 9 Januari 2026

Bank Muamalat	Rp 3.248.580.793
Bank BSG	Rp 372.045.645
Total Saldo	Rp 3.620.626.438
Total Pertambahan Saldo setelah dikurangi pengeluaran selang 30 Mei s/d 12 Juni 2026	
	Rp 106.454.766

Gorontalo Kejar Target Investasi Rp5,88 Triliun

GORONTALO - Realisasi investasi Gorontalo hingga triwulan II 2026 baru mencapai Rp1,84 triliun. Angka itu masih jauh dari target Rp5,88 triliun yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Pemerintah Provinsi Gorontalo kini mencoba mengejar ketertinggalan dengan mendorong perusahaan besar membuka ruang usaha bagi UMKM lokal.

Skema kemitraan menjadi salah satu jalan yang ditempuh. Bukan sekadar mempertemukan perusahaan dengan pelaku UMKM, Pemprov ingin

investasi yang masuk ke Gorontalo ikut menggerakkan usaha lokal, mulai dari penyediaan bahan baku, jasa pendukung, pengolahan hingga pemasaran. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan, keterlibatan UMKM penting agar pertumbuhan investasi tidak berhenti pada nilai modal yang ditanam perusahaan. "Investasi tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga menciptakan nilai tambah, kesempatan usaha dan pemerataan ekonomi daerah," kata Gusnar saat

membuka fasilitasi kemitraan penanaman modal antara usaha besar dan UMKM di Ballroom Hotel UTC Damhil, Kota Gorontalo, Kamis (20/8) pekan lalu.

Menurut Gusnar, pola tersebut memiliki pijakan regulasi melalui kebijakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi itu menjadi dasar untuk mempertemukan investor atau perusahaan besar dengan pelaku usaha lokal dalam satu ekosistem investasi. Potensi kemitraan terbuka lebar karena struktur ekonomi Gorontalo

ditopang sejumlah sektor, seperti pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata dan perdagangan. Perusahaan besar yang beroperasi di daerah, kata Gusnar, semestinya tidak berjalan terpisah dari ekonomi lokal. UMKM harus mendapat peluang masuk ke rantai bisnis perusahaan, bukan hanya menjadi penonton ketika investasi masuk. "UMKM harus punya kesempatan menjadi pemasok bahan baku, penyedia jasa pendukung, pengolah hasil produksi hingga masuk ke rantai pemasaran dan



Gusnar Ismail

ekspor," ujarnya. Dalam forum tersebut, lima perusahaan

menandatangani kesepakatan kemitraan dengan UMKM. Mereka adalah PT Royal Coconut, PT Seger Agro Nusantara, PT Inti Cakrawala Citra, Hotel UTC Damhil dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Total nilai kerja sama yang diteken mencapai Rp56,7 miliar. Gusnar juga mengaitkan geliat investasi dengan upaya mendatangkan lebih banyak kegiatan berskala nasional ke Gorontalo. Menurutnya, aktivitas nasional dapat membuka pasar baru bagi pelaku UMKM sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi daerah. (tro)

UMKM Gorontalo Buktikan Mampu Bersaing



UMKM NAIK KELAS - Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal, M.Rudy Salahudin, didampingi Deputi KPw Bank Indonesia Gorontalo, Ciptoning Suryo Condro, melihat produk UMKM Gorontalo, pada Karya Kreatif Indonesia yang Berlangsung di JCC, Jakarta.

KKI 2026 Catat Lonjakan Transaksi 186,8 Persen

JAKARTA - Produk UMKM Gorontalo menunjukkan taringnya di panggung nasional. Hanya dalam empat hari mengikuti Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026, yang berlangsung Hall A dan B JICC, Jakarta, 20-23 Agustus 2026, pelaku usaha binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Gorontalo mencatat penjualan Rp298,3 juta, melonjak 186,8 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut menjadi sinyal bahwa produk unggulan Gorontalo semakin memiliki daya tarik di pasar yang lebih luas. Namun, angka penjualan bukan satu-satunya capaian yang dibawa UMKM Gorontalo dari KKI 2026.

Peluang menembus pasar internasional juga terbuka melalui Dellacious Coffee. Produk kopi asal Gorontalo tersebut mendapatkan komitmen penjajakan pasar melalui Letter of Intent (LoI) dengan mitra bisnis dari Jepang. Langkah itu menjadi peluang awal bagi kopi Gorontalo untuk dikembangkan ke pasar Jepang sekaligus memperluas jejaring bisnis di luar negeri.

Capaian UMKM Gorontalo tersebut sejalan dengan tren positif KKI 2026 secara nasional. Hingga 22 Agustus 2026, penjualan sementara KKI mencapai Rp144,2 miliar, tumbuh 46 persen dibandingkan capaian 2025.

KKI juga mencatat business matching ekspor Rp169,9 miliar dengan melibatkan

192 UMKM dan pembeli dari 16 negara. Sementara BM pembiayaan mencapai Rp285 miliar, meningkat 30,3 persen dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, mengatakan penguatan UMKM membutuhkan sinergi berkelanjutan agar pelaku usaha dapat tumbuh, tangguh, dan berdaya saing.

KKI 2026 melibatkan lebih dari 1.860 UMKM dari seluruh Indonesia. Hampir 560 UMKM tampil secara luring dengan membawa berbagai produk, mulai dari wastra, ready to wear, makanan dan minuman, home decor, hingga karya kreatif generasi muda. Dukungan terhadap KKI juga datang dari 27 kementerian/lembaga dan 34 asosiasi, industri, perbankan, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bank Indonesia menguatkan akses tersebut melalui jaringan 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan lima Kantor Perwakilan Luar Negeri.

Bagi UMKM Gorontalo, capaian Rp298,3 juta sekaligus peluang masuk pasar Jepang menjadi bukti bahwa produk lokal memiliki ruang untuk berkembang di luar daerah.

Tantangannya kini bukan lagi sekadar membuat produk dikenal, tetapi memastikan kualitas, kapasitas produksi, inovasi, dan keberlanjutan mampu menjawab permintaan pasar yang lebih besar. KKI 2026 memberi panggung. UMKM Gorontalo mulai menunjukkan bahwa mereka mampu tampil dan bersaing di atas panggung tersebut. (tro)

Kopi Gorontalo Merambah Pasar Jepang

JAKARTA - GP - Kopi Gorontalo mulai mengendus peluang pasar Jepang. Di tengah riuhnya transaksi Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026, Dellacious Coffee mencatat satu langkah penting: komitmen penjajakan pasar melalui Letter of Intent (LoI) dengan mitra bisnis dari Jepang.

Kesepakatan awal tersebut membuka peluang bagi produk kopi Gorontalo untuk memperluas pasar ke Negeri Sakura. Peluang itu menjadi salah satu capaian penting UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Gorontalo dalam KKI 2026. Selama empat hari pelaksanaan KKI, UMKM Gorontalo berhasil membukukan penjualan Rp298,3 juta. Nilai tersebut meningkat 186,8 persen dibandingkan capaian pada KKI 2025. Lonjakan tersebut menunjukkan produk unggulan Gorontalo mulai memperoleh respons pasar yang semakin luas. Namun, capaian di KKI 2026 tidak berhenti pada transaksi penjualan. Peluang masuk



BUSINESS MATCHING: Dellacious Coffee Gorontalo mencatatkan komitmen penjajakan pasar melalui Letter of Intent (LoI) dengan mitra bisnis dari Jepang pada ajang KKI 2026 di Jakarta.

pasar internasional menjadi capaian yang tak kalah penting.

Melalui Dellacious Coffee, produk kopi Gorontalo mulai diujicoba untuk dikembangkan ke pasar Jepang. Komitmen tersebut ditandai dengan LoI bersama mitra bisnis Jepang.

Bagi UMKM, peluang semacam ini menjadi pintu menuju pasar yang lebih besar sekaligus ujian terhadap kualitas, kapasitas produksi, konsistensi, dan daya saing

produk lokal. Capaian Gorontalo tersebut menjadi bagian dari geliat UMKM Indonesia dalam KKI 2026. Secara nasional, penjualan sementara KKI mencapai Rp144,2 miliar hingga 22 Agustus 2026, meningkat 46 persen dibandingkan capaian 2025. KKI juga mencatat business matching ekspor senilai Rp169,9 miliar yang melibatkan 192 UMKM dengan pembeli dari 16 negara.

Sementara BM pembiayaan mencapai Rp285 miliar, meningkat 30,3 persen dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menegaskan pengembangan UMKM harus diarahkan pada terbentuknya ekosistem yang memungkinkan pelaku usaha tumbuh secara berkelanjutan.

KKI 2026 melibatkan lebih dari 1.860 UMKM dari seluruh Indonesia dan didukung 27 kementerian/lembaga serta 34 asosiasi, industri, perbankan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan jaringan Bank Indonesia juga mencakup 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan lima Kantor Perwakilan Luar Negeri. Bagi Gorontalo, capaian KKI 2026 memberi pesan yang lebih besar dari sekadar angka penjualan. Produk lokal mulai memiliki jalan untuk keluar dari pasar daerah dan berhadapan langsung dengan pasar internasional. Dan kali ini, pintunya mengarah ke Jepang. (tro)

SENSUS EKONOMI 2026

15 Juni - 31 Agustus 2026

Setiap Jawaban Anda, Menentukan Masa Depan Bangsa

Ingat TIR!

- Terima Petugas SE2026
- Isi Data dengan Benar
- Rahasia Terjaga

Call Center: 0815-126-2026

Gorontalo Bidik Teknologi IPAL Jepang



Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Kanako Seki dari Janus dan pihak Ehime Prefektur, meninjau percontohan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di RS Pusat Otak Nasional Jakarta, Sabtu (22/8). (foto: dok-gorontaloprov.go.id)

Untuk RS Ainun, Tindaklanjuti Kerja Sama Gorontalo-Ehime

GORONTALO - Gorontalo membidik teknologi pengolahan limbah rumah sakit asal Jepang untuk diterapkan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie. Teknologi Johkasou yang diklaim minim pencemaran itu tengah dipelajari sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan limbah medis dan lingkungan di daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Direktur RSUD Ainun Habibie, Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo meninjau langsung penerapan teknologi tersebut di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Jakarta, Sabtu (22/8).

Teknologi Johkasou merupakan sistem pengolahan air limbah asal Jepang yang memanfaatkan bakteri pengurai alami. Sistem ini dirancang untuk mengolah limbah tanpa menghasilkan pencemaran lingkungan, memiliki ketahanan terhadap korosi, masa pakai panjang dan tidak membutuhkan lahan besar. Teknologi tersebut menjadi salah satu opsi yang sedang didalami Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menjawab kebutuhan pengelolaan

limbah rumah sakit yang semakin penting seiring pengembangan layanan kesehatan.

Peninjauan di RS PON juga menjadi tindak lanjut pembicaraan kerja sama antara Gorontalo dan Ehime Prefektur, Jepang, yang sebelumnya digagas Gusnar saat kunjungan ke Jepang pada Maret 2026. Turut dalam agenda tersebut Kanako Seki dari Janus serta perwakilan Ehime Prefektur. Setelah melihat langsung sistem pengolahan limbah di RS PON, pembahasan akan dilanjutkan untuk mengukur efektivitas, keunggulan, kebutuhan teknis dan kemungkinan penerapannya di Gorontalo.

Direktur RSUD Ainun Habibie, dr. Fitriyanto, mengatakan hasil peninjauan menjadi bahan penting untuk menentukan langkah berikutnya. Tim dari Ehime Prefektur juga dijadwalkan meninjau langsung kondisi RSUD Ainun Habibie di Gorontalo. â€œIni penting untuk ditindaklanjuti. Kami sepakat mengagendakan kunjungan Tim Ehime ke RS Ainun Habibie untuk melihat langsung kondisi dan kebutuhan di lapangan, kata Fitriyanto. Jika teknologi tersebut dinilai sesuai, kerja sama Gorontalo-Ehime tidak berhenti pada pertukaran gagasan. Teknologi pengolahan limbah itu berpeluang menjadi bagian dari pembenahan sistem pengelolaan lingkungan rumah sakit di Gorontalo. (tro)

DPR Kebut RUU Perampasan Aset

JAKARTA-DPR RI memasang tenggat keras untuk menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Komisi III DPR hanya memiliki sekitar delapan minggu masa sidang efektif untuk merampungkan seluruh tahapan pembahasan sebelum regulasi itu dibawa ke rapat paripurna pada Desember 2026. Ketua Komisi III DPRRI Habiburokhman mengatakan waktu yang tersisa akan dipakai untuk menggeber seluruh tahapan legislasi, mulai dari penyerapan aspirasi hingga pembahasan bersama pemerintah. Kalau dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (25/8).

Dalam rentang waktu tersebut, Komisi III harus menuntaskan

sejumlah agenda yang belum selesai. Di antaranya rapat dengar pendapat umum (RDPU), harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), hingga pengambilan keputusan tingkat pertama. Setelah seluruh tahapan itu rampung, RUU akan memasuki pembahasan tingkat kedua untuk diputuskan dalam rapat paripurna DPR pada Desember.

Habiburokhman menyebut proses penjaringan aspirasi publik sejauh ini telah dilakukan secara intensif. Komisi III mencatat sudah menggelar 35 RDPU, tiga kunjungan kerja ke daerah serta menerima masukan tertulis dari puluhan kelompok masyarakat. Bagi masyarakat yang masih ingin menyampaikan pandangan, Komisi III masih membuka ruang. Namun, dengan waktu pembahasan yang kian sempit, masukan diminta disampaikan

dalam bentuk konsep tertulis agar dapat segera dipelajari dan masuk dalam pembahasan. Menurut Habiburokhman, peta pandangan publik terhadap RUU Perampasan Aset juga mulai terbentuk. Dukungan terhadap pembentukan aturan tersebut cukup besar, tetapi publik sekaligus menuntut agar kewenangan yang nantinya diberikan kepada aparat penegak hukum tidak berubah menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset. Tetapi mereka juga ingin aturan ini disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, â€œujarnya.

Tuntutan itu menjadi salah satu titik krusial dalam pembahasan. RUU Perampasan Aset diharapkan



Komisi III DPR Pasang Target RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026 Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yulianti memimpin rapat pembentukan RUU Perampasan Aset. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

dapat memperkuat pemberantasan korupsi tanpa melahirkan kekuasaan baru yang justru sulit diawasi. Dengan waktu efektif hanya sekitar delapan minggu, Komisi III kini

berpacu dengan jadwal. Targetnya jelas: seluruh pembahasan tuntas dan RUU Perampasan Aset masuk meja paripurna DPR sebelum tahun 2026 berakhir. (jp)

■ Jelang Demo 27 Agustus

Bus Massa Dilempar Batu, Sopir Diteror

JAKARTA - Sopir bus yang disewa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) untuk membawa rombongan aksi tambahan ke Gedung DPR RI Jakarta, mengaku mendapat intimidasi dan ancaman pengrusakan dari nomor telepon tidak dikenal.

Gertakan tersebut dialami pengemudi saat armada tengah diparkir di kawasan Pendopo Kabupaten Pati menjelang keberangkatan. Intimidasi ini terungkap saat perwakilan massa berkumpul di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (25/8). Sopir bus mengaku dihubungi nomor asing dengan ancaman serius jika tetap nekat mengantarkan massa demo ke ibu kota. â€œBilamana meneruskan perjalanan bawa (massa) demo, surat izin bus sama SIM bakal dicabut dan nanti di jalan gak tau ada pengrusakan bus apa enggak gitu. Tidak bertanggung jawab,â€ ujar sopir bus dalam video yang diunggah akun @ampbpati. Meski mendapat tekanan hebat, pihak manajemen bus dan koordinator lapangan menegaskan pergerakan rombongan akan tetap berjalan sesuai rencana tanpa rasa takut. Selain komitmen mengawal aspirasi,

faktor klausul kontrak kerja sama armada menjadi alasan kuat rombongan tidak mundur. Perwakilan massa aksi, Novi mengungkap adanya aturan ganti rugi jika terjadi pembatalan sepihak oleh agen. â€œTadi di perjanjian ada klausul seperti ini. Bilamana agen membatalkan secara sepihak, uang yang kita bayarkan, tadi kan dua bus kan Rp26 juta, satu busnya Rp13 juta, bilamana ada pembatalan sepihak, kita suruh ganti tiga kali lipat. Nah, karena itu merupakan ancaman, kita menguatkan Mas dan pihak manajemen,â€ katanya. Novi menekankan bahwa mereka tetap solid melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. â€œIya, tetap. Nggak usah takut,â€ tegasnya.

Rombongan massa Pati bergerak menuju Jakarta untuk bergabung dalam aksi penyampaian pendapat di depan DPR RI. Massa yang lebih dahulu tiba telah mendirikan posko koordinasi di lokasi untuk menyambut massa armada bus berikutnya. Aksi ini membawa dua poin tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR RI. Yakni, pengesahan RUU Perampasan Aset Korupsi sebagai langkah tegas memiskinkan pelaku kejahatan rasuah.

Dan kedua ialah penerapan Hukuman Mati bagi para koruptor guna memberikan efek jera maksimal. Koordinator AMPB, Supriyono alias Mas Botok memastikan seluruh rangkaian perjalanan dan aksi penyampaian pendapat oleh warga Pati akan terus berpedoman pada aturan serta berlangsung aman. â€œWarga Pati datang ke Jakarta ini tidak mau membuat kerusuhan ya. Warga Pati datang ke Jakarta ini mengawal aspirasi rakyat Indonesia,â€ katanya

Sementara teror terhadap bus massa asal Pati benar terjadi, dua orang menggunakan hoodie diduga melempar batu bata ke bus di Tol Jakarta-Cikampek, Senin (24/8). Aksi terjadi ketika bus melaju menuju Gedung DPR RI untuk mengantar rombongan AMPB yang akan menyampaikan aspirasi. Batu bata menghantam kaca depan bagian atas bus hingga retak parah, sementara rombongan tetap melanjutkan perjalanan menuju Senayan. Koordinator AMPB Teguh Istiyanto mengatakan, pelemparan berlangsung di sekitar KM 54-55, wilayah Karawang, tepatnya dari atas jembatan penyeberangan orang (JPO). (jp)



Bus yang membawa rombongan warga Pati rusak, setelah dilempati batu saat dalam perjalanan menuju Jakarta di kawasan Karawang-Cikarang, Senin (24/8). (foto: istimewa)

Bupati Minta Program
PKK Andalkan Data



Sofyan Puhi

LIMBOTO - Bupati Gorontalo Sofyan Puhi meminta Tim Penggerak PKK mengubah pola kerja dengan mengandalkan data dan memperkuat kolaborasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

Langkah ini dinilai penting agar program PKK tidak sekadar berjalan, tetapi benar-benar menysasar kebutuhan masyarakat. Sofyan menegaskan, administrasi dan data bukan sekadar urusan pencatatan organisasi. Data menjadi dasar untuk menentukan program, mengukur pelaksanaan, sekaligus memastikan intervensi PKK tepat sasaran.

"Administrasi dan data yang tertib merupakan bagian dari akuntabilitas kita. Kita ingin PKK sukses dalam kegiatan, administrasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Sofyan saat menghadiri Sosialisasi Administrasi dan Data Kelompok PKK Desa dan Kecamatan serta Penguatan Program Kerja Pokja PKK Kabupaten Gorontalo, Senin (24/8).

Ia juga meminta hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK tidak berhenti sebagai dokumen organisasi. Setiap program harus diterjemahkan sesuai persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerah hingga tingkat desa. Untuk itu, masing-masing Pokja diminta membangun kerja bersama dengan OPD. Kolaborasi diperlukan agar program PKK tidak berjalan sendiri-sendiri dan memiliki dukungan teknis sesuai bidangnya.

Salah satu yang disorot adalah transformasi Posyandu. Menurut Sofyan, Posyandu perlu diperkuat bukan hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga sebagai titik pemberdayaan masyarakat.

Peran itu dapat diperluas untuk mendukung penanganan stunting, peningkatan kesehatan keluarga hingga pemberian makanan tambahan (PMT). "PKK bukan hanya organisasi pelaksana kegiatan, tetapi gerakan yang dekat dengan keluarga. Kekuatan PKK ada pada kader, data, dan kemampuan bekerja bersama menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya. Penguatan data dan kolaborasi tersebut diharapkan membuat program PKK lebih terukur sekaligus memastikan kebijakan yang lahir di tingkat kabupaten benar-benar diterapkan hingga desa. (adv)



(FOTO: DOK. DISKOMINFO)

Doa Maulid Nabi Muhammad oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dilaksanakan di Masjid Agung Baiturahman Limboto, Senin (24/8).

Pemkab Gorontalo Gelar
Doa Maulid Serentak

Salawat Nabi
Muhammad
Menggema ke
Seluruh Wilayah

LIMBOTO - Doa Maulid Nabi Muhammad SAW menggema serentak dari Masjid Agung Baiturahman Limboto hingga masjid-masjid di tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Gorontalo, Senin (24/8).

Pemkab Gorontalo menjadikan peringatan Maulid bukan sekadar

agenda seremonial tahunan. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat memperkuat kebersamaan, sekaligus memanjatkan doa bagi keselamatan, keamanan dan keberkahan daerah.

Di Masjid Agung Baiturahman Limboto, doa Maulid dihadiri Bupati Gorontalo Sofyan Puhi bersama jajaran pemerintah daerah dan masyarakat. Sofyan mengatakan, tradisi tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan keagamaan masyarakat Gorontalo.

"Ini tradisi yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah, sekaligus memohon doa untuk negeri agar diberikan kesejahteraan, keamanan dan keberkahan," kata Sofyan.

Menurut Bupati, pelaksanaan secara serentak hingga tingkat desa menunjukkan bahwa peringatan Maulid masih memiliki tempat kuat dalam kehidupan masyarakat.

Masjid menjadi ruang bersama untuk mempertemukan pemerintah dan warga dalam suasana keagamaan.

Namun, nilai Maulid tidak berhenti pada lantunan doa dan rangkaian acara.

Keteladanan Nabi Muhammad SAW, kata Sofyan, semestinya diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam menjaga persaudaraan, kebersamaan dan kepedulian antarsesama. Dengan demikian, gema Maulid tidak hanya terdengar di masjid.

Nilai yang dibawa dari peringatan itu diharapkan ikut hidup di tengah masyarakat, dari pusat kabupaten hingga pelosok desa. (adv)

Daya Auto Bikin Jadwal
Perawatan Motor Lebih Teratur

GORONTALO - Kesibukan sering membuat hal kecil terlewat, termasuk urusan servis sepeda motor. Padahal, perawatan berkala menjadi salah satu kunci menjaga performa kendaraan tetap optimal. Menjawab persoalan tersebut, PT Daya Adicipta Wisesa (DAW) menghadirkan Daya Auto, aplikasi yang membantu konsumen Honda mengatur sekaligus memantau perawatan kendaraan dengan lebih praktis. Salah satu fitur yang menjadi andalan Daya Auto adalah pengingat jadwal servis berkala.

Fitur ini membantu konsumen mengetahui

kapans sepeda motor perlu kembali mendapatkan perawatan, sehingga jadwal servis tidak lagi bergantung pada catatan manual atau sekadar mengandalkan ingatan. Bagi pengguna dengan mobilitas tinggi, kemudahan tersebut menjadi penting. Sebab, melewatkan jadwal servis bukan hanya soal lupa tanggal, tetapi juga dapat membuat perawatan kendaraan menjadi tidak teratur.

Aplikasi ini juga menyediakan riwayat servis kendaraan, sehingga konsumen dapat melihat kembali rekam perawatan sepeda motor secara lebih tertata. Informasi servis yang pernah dilakukan



(FOTO: DOK. DAW)

PT Daya Adicipta Wisesa (DAW) menghadirkan Daya Auto, aplikasi yang membantu konsumen Honda mengatur sekaligus memantau perawatan kendaraan dengan lebih praktis.

dapat menjadi referensi untuk menentukan perawatan berikutnya. Kemudahan semakin lengkap dengan fitur

booking servis online. Konsumen dapat menentukan jadwal perawatan melalui smartphone tanpa harus

datang terlebih dahulu ke dealer hanya untuk melakukan pendaftaran. Dengan begitu, proses menuju layanan servis

menjadi lebih sederhana: jadwal dapat dipantau, riwayat perawatan tersimpan, dan booking bisa dilakukan secara digital.

"Melalui Daya Auto, kami ingin membantu konsumen Honda lebih mudah dalam menjaga dan merawat kendaraannya. Fitur pengingat dan riwayat servis menjadi salah satu bentuk kemudahan agar perawatan sepeda motor dapat dilakukan secara lebih teratur dan tidak terlewat," ujar Alexander Abimanto, HC3 Department Head PT Daya Adicipta Wisesa. Kehadiran Daya Auto menunjukkan bagaimana layanan digital mulai mengambil

peran dalam rutinitas perawatan kendaraan. Konsumen tidak hanya mendapatkan informasi layanan Honda, tetapi juga memiliki teman digital untuk membantu menjaga jadwal dan rekam perawatan sepeda motor. Perawatan yang dilakukan secara teratur diharapkan dapat membantu menjaga kondisi kendaraan sekaligus memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam penggunaan sehari-hari. Bagi konsumen Honda yang ingin memanfaatkan kemudahan tersebut, aplikasi Daya Auto dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store dan App Store. (tro)

Komisi II Desak Developer Penuhi PSU



Dokumentasi rapat kerja Dekot bersama Pemkot di Aula I.

(F. ISTIMEWA)

Pengawasan Diperketat Sejak Tahap Perizinan

GORONTALO - GP - Persoalan minimnya prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di sejumlah kawasan perumahan di Kota Gorontalo kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo. Komisi II menilai pengembang harus bertanggung jawab memenuhi fasilitas lingkungan yang menjadi bagian dari kewajiban pembangunan perumahan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II Dekot Gorontalo, Herman Haluti, dalam rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (24/8/2026), di Aula DPRD Kota Gorontalo.

Rapat tersebut membahas keluhan masyarakat terkait kondisi jalan, drainase, ruang terbuka hijau hingga fasilitas pembuangan sampah yang belum tersedia atau belum memenuhi ketentuan.

Herman mengatakan, rapat digelar untuk mencari solusi agar pengembang segera menyelesaikan kewajibannya.

"Ini untuk mencari solusi agar developer yang bertanggung jawab terhadap pembangunan PSU segera melakukan pembangunan, karena PSU tersebut sudah inklud di harga rumah," kata Herman. Selain itu, Komisi II juga mendorong agar pemenuhan fasilitas lingkungan menjadi salah satu pertimbangan sebelum pembayaran unit rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dilakukan perbankan. Herman menilai, sebelum pembayaran unit rumah dilakukan bank, kewajiban pengembang semestinya sudah dipenuhi. Jika ketentuan tersebut belum dipenuhi, kata Herman, bank diharapkan tidak melayani pembayaran unit rumah dari kawasan yang belum memenuhi ketentuan.

"Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, menurutnya, bank yang memberikan fasilitas KPR tidak melayani pembayaran unit rumah dari perumahan yang belum memenuhi ketentuan PSU,"



Herman Haluti

ujarnya.

Disisilain, Komisi II menilai penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak cukup hanya memperhatikan kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis. Aspek lingkungan dan potensi bencana di lokasi pembangunan juga dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurut Herman, rumah yang memenuhi persyaratan administratif belum tentu aman jika dibangun di kawasan yang memiliki risiko lingkungan maupun bencana. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan sejak proses pengesahan site plan, PBG hingga pembangunan berlangsung.

"Mulai dari proses pengesahan site plan, PBG, dan izin lainnya," tegasnya.

Komisi II juga masih mengkaji kemungkinan keterlibatan DPRD dalam tim pengawasan. Herman mengatakan, hal tersebut perlu dibahas lebih lanjut karena DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan sejak awal dapat mencegah munculnya persoalan setelah rumah terjual dan dihuni masyarakat. Komisi II berharap pemerintah daerah, pengembang dan perbankan memiliki mekanisme yang jelas untuk memastikan pembangunan kawasan hunian berjalan sesuai ketentuan. "Dengan pengawasan yang lebih ketat, pengembang diharapkan memenuhi seluruh kewajibannya sehingga masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan setelah membeli rumah" harap Herman. (Adv)

Orang Tua Didorong Awasi Anak Gunakan Handphone

GORONTALO - GP - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Nur Rahman Monoarfa, mendorong peran aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan handphone oleh anak-anak. Untuk itu, Monoarfa menegaskan dukungannya terhadap imbauan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, terkait pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak saat menggunakan perangkat digital. "Apayang disampaikan pak wali kota soal pengawasan penggunaan handphone oleh anak-anak memang



Nur Rahman Monoarfa

perlu mendapat perhatian serius dari orang tua," ujar Monoarfa. Ia menilai, saat ini penggunaan handphone di kalangan anak-anak cenderung sudah melampaui batas wajar. Kondisi

tersebut dinilai berpotensi mengganggu aktivitas belajar serta perkembangan anak.

"Waktu belajar harus lebih banyak dibandingkan waktu bermain handphone. Jangan sampai anak-anak lebih fokus bermain game daripada belajar. Di sinilah pentingnya peran orang tua untuk mengontrol," tegasnya. Menurutnya, pengawasan yang konsisten dari orang tua menjadi kunci agar anak tidak mengalami ketergantungan terhadap gawai. Ia juga mengingatkan bahwa pembatasan waktu penggunaan handphone perlu diterapkan secara tegas namun

bijak.

Selain menyoroti isu tersebut, Monoarfa juga menyampaikan bahwa pembangunan di Kota Gorontalo terus berjalan di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Indra Gobel. Ia berharap masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan program pemerintah melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan langsung warga.

"Kegiatan seperti ini penting untuk dihadiri masyarakat, agar mereka mengetahui program pemerintah sekaligus memberikan masukan demi kemajuan daerah," tandasnya. (Adv)

Alan Dukung Rehabilitasi Stadion Merdeka

GORONTALO-GP - Rencana Pemerintah Kota Gorontalo merehabilitasi Stadion Merdeka dan GOR Nani Wartabone. Fasilitas olahraga yang representatif akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat maupun pembinaan atlet," ujarnya.

Menurut Alan, pemerintah perlu memastikan proses rehabilitasi dilaksanakan sesuai perencanaan, mulai dari tahapan administrasi hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kualitas pekerjaan juga harus menjadi perhatian agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Ia berharap rehabilitasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan,

tetapi juga melengkapi sarana pendukung yang dibutuhkan

pengguna. Dengan fasilitas yang lebih baik, masyarakat akan semakin nyaman berolahraga, sementara atlet memiliki tempat latihan yang lebih memadai.

Selain itu, Alan menilai keberadaan fasilitas olahraga yang layak dapat mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi dari Kota Gorontalo. Karena itu, ia meminta proyek rehabilitasi benar-benar dikerjakan secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan.

"Kami juga akan menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan rehabilitasi berjalan sesuai perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan. Harapannya, hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.



Alan Lahay

Sebelumnya, Pemerintah Kota Gorontalo menyatakan akan merehabilitasi Stadion Merdeka dan GOR Nani Wartabone sebagai upaya meningkatkan kualitas fasilitas olahraga. Saat ini pemerintah daerah tengah menuntaskan dokumen administrasi dan teknis sebagai syarat dimulainya proses pengadaan pekerjaan. (Adv)

Berlangganan Koran muali dari

IDR 75.000

SCAN ME

Harian Gorontalo Post Cetak & Digital

Koran Digital

GORONTALO POST

ANDA INGIN

Berlangganan Koran Gorontalo Post

atau

KORAN ANDA BELUM DIANTAR AHRI INI

Hubungi :

0812-4470-554

GORONTALO POST

750 Honorer Kota Diberhentikan

SPORTIVO

METRO-POLES

SHOWBIZ

J&T CARGO

GORONTALO 907A

100% Dijamin Ekonomis

0853 9448 8783 0822 9309 9280 0821 9588 2277

J&T Cargo Gorontalo Post

KIRIM CEPAT, MURAH & BISA BANYAK

Alamat : Jl. Dr. Jhon Aryo Katili No.144 Kel. Paguyaman Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo

RENUNGAN ROHANI BE RADIO - 94.3 FM SETIAP HARI 08.00 WITA

CITY HARVEST CHURCH INDONESIA - GORONTALO

JL. WOLTER MONGINSIDI
CONTACT PERSON 0435-829392
WHATSAPP : 085256276914
INSTAGRAM/FACEBOOK : C HARVEST GORONTALO
YOUTUBE : CHC INDO GTO

IBADAH RALLY PRAYER
SETIAP HARI KAMIS PUKUL 19.30 WITA

IBADAH DOA FAJAR VIA ZOOM MEETING
MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED
SETIAP HARI JUMAT PUKUL 05.00 WITA

BEFORE BED (DOA SEBELUM BERISTIRAHAT)
VIA ZOOM MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED
SETIAP HARI SENIN DAN JUMAT PUKUL 21.00 WITA

GEREJA ANAK (CHILDREN'S CHURCH)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.30 WITA

IBADAH RAYA PAGI (LIVE STREAMING VIA YOUTUBE)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.00 WITA

IBADAH RAYA SORE (DI HOTEL ELIZABETH LIMBOTO, SAMPING POLRES)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

IBADAH STAY : STUDENT-TEENAGE-AND-YOUTH
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

KESEPAKATAN PANSUS PAJAK-RETRIBUSI

Iuran Tambang Rakyat Tujuh Persen



RAPAT Pansus Ranperda perubahan Pajak dan Retribusi Daerah bersama tim pembahas dari eksekutif.

Jalan Tulabolo–Pinogu Diseriusi

PUNCAK BOTU -GP- Pembangunan akses jalan Tulabolo–Pinogu kembali menjadi perhatian lintas pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, DPRD dan para pihak terkait didorong tidak lagi melihat persoalan konektivitas wilayah tersebut sebatas agenda pertemuan, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah pembangunan yang konkret, terukur dan berkelanjutan.

Hal itu mengemuka dalam Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tulabolo–Pinogu dengan tema “Membangun Ekosistem Kolaborasi Lestari untuk Percepatan Pembangunan Akses Jalan Tulabolo–Pinogu”, yang digelar Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango di Hotel Aston Kota Gorontalo,

Senin (24/8/2026).

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang diwakili Anggota Komisi I Yeyen Saptiani Sidiki menegaskan pentingnya membangun ekosistem kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, masing-masing pihak harus mampu menerjemahkan kewenangannya menjadi kontribusi nyata. Jangan sampai forum menghasilkan dokumen komitmen, tetapi tidak diikuti dengan kejelasan siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan dan dari mana sumber pembiayaannya.

“Forum ini harus menjadi ruang untuk menyatukan perspektif, kepentingan, kewenangan dan sumber daya. Yang

terpenting, hasilnya harus menghasilkan langkah nyata untuk mempercepat pembangunan akses jalan Tulabolo–Pinogu,” ujar Yeyen. Ia menilai konektivitas Tulabolo–Pinogu memiliki arti strategis karena menyangkut keterhubungan masyarakat dengan pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya.

Keterbatasan akses tidak hanya membuat perjalanan masyarakat menjadi lebih sulit, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan memperlebar kesenjangan pembangunan antara wilayah yang memiliki akses infrastruktur memadai dengan wilayah yang masih terisolasi.

Salah satu agenda penting dalam forum tersebut adalah penandatanganan berita acara komitmen bersama sebagai landasan tindak lanjut pengawalan pembangunan akses jalan Tulabolo–Pinogu.

“Komitmen bersama ini harus menjadi landasan untuk pengawalan bersama. Kita ingin prosesnya jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Yeyen.

Dengan adanya komitmen lintas sektor tersebut, pembangunan Tulabolo–Pinogu diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial. Seluruh pihak dituntut mengubah pola kerja dari sekadar koordinasi menjadi kolaborasi berbasis target dan hasil. (rmb)

PUNCAK BOTU -GP- Pertemuan Pansus Ranperda perubahan pajak dan retribusi daerah bersama Bapenda, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, serta Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, Senin (24/8), menyepakati besaran iuran pertambangan rakyat sebesar tujuh persen.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Deprov Gorontalo, La Ode Haimuddin, bersama pimpinan dan anggota Pansus. Pembahasan difokuskan pada sejumlah substansi penting dalam Ranperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait pengaturan iuran Pertambangan Rakyat.

Ketua Pansus, Sun Biki, menyampaikan bahwa setelah melalui pembahasan yang cukup alot dengan mempertimbangkan sejumlah opsi, yakni 5 persen, 6 persen, dan 7 persen, Pansus akhirnya menyepakati besaran iuran Pertambangan Rakyat sebesar 7 persen.

Menurut Sun Biki, angka tersebut dinilai cukup fleksibel dan tidak memberatkan masyarakat penambang, baik yang menggunakan metode pertambangan terbuka (open pit) maupun metode bawah tanah (underground).

“Setelah pembahasan yang cukup alot, kita menyepakati angka 7 persen. Ini kita harapkan menjadi angka yang fleksibel, sehingga tidak memberatkan para penambang, baik open pit maupun underground,” ujar Sun Biki.

Selain besaran iuran, Pansus juga memberikan perhatian serius terhadap pengawasan dan efektivitas pemanfaatan dana tersebut. Iuran 7 persen diharapkan dapat digunakan secara tepat sasaran, terutama untuk mendukung program reklamasi serta pemulihan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

Dalam pembahasan juga disepakati adanya klausul yang memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola. Sementara itu, OPD teknis akan melakukan pengawasan terhadap kinerja operasional BUMD tersebut.

Sun Biki menegaskan, pembahasan Pansus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan para penambang dan masyarakat secara umum. Pengaturan iuran diharapkan tidak merugikan salah satu pihak, sekaligus memastikan aktivitas pertambangan memberikan manfaat yang lebih luas.

“Kita ingin ada keseimbangan antara kepentingan penambang dan masyarakat secara umum. Jangan sampai aturan ini justru merugikan salah satu pihak,” jelasnya.

Ia berharap keberadaan tambang emas di Gorontalo dapat memberikan kemaslahatan dan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

“Harapan kita, dengan adanya tambang emas ini, bisa memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat Gorontalo, bukan justru mendatangkan mudarat,” tegas Sun Biki.

Lebih lanjut, Sun Biki menyampaikan bahwa seluruh pembahasan Pansus telah mengarah pada tahapan akhir. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II untuk penetapan Ranperda menjadi Perda disepakati, insyaallah, akan dilaksanakan pada Selasa, 1 September 2026. (rmb)



SEJUMLAH anggota Deprov dapil Bone Bolango menghadiri rapat koordinasi membahas percepatan pembangunan jalan Tulabolo–Pinogu.

PENDIDIKAN

RABU, 26 AGUSTUS
TAHUN 2026

HARIAN GORONTALO POST

Tim Peneliti BIMA Hadirkan Model PPKn Digital Adaptif

E-Civic Adaptif
Dirancang Perkuat
Civic Disposition
Siswa SMP di Kota
Gorontalo

GORONTALO-GP- Tim Peneliti BIMA Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait pengembangan model perencanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berbasis digital adaptif, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan bertajuk “Analisis Model Perencanaan Pembelajaran PPKn Berbasis Digital Adaptif sebagai Akselerator Civic Disposition Siswa SMP Negeri di Kota Gorontalo” tersebut menjadi bagian dari upaya

menghadirkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa.

Model yang dikembangkan berupa modul ajar yang terintegrasi dengan website E-Civic Adaptif. Platform tersebut tersedia dalam versi desktop untuk guru dan versi mobile bagi siswa.

Ketua Tim Peneliti, Prof. Zulaecha Ngiu, S.Pd., M.Pd., mengatakan pengembangan model tersebut berangkat dari hasil praobservasi di 16 SMP Negeri se-Kota Gorontalo.

Hasil penelusuran menunjukkan masih terdapat kendala dalam penyusunan perencanaan pembelajaran PPKn yang terintegrasi dengan teknologi digital secara adaptif. “PPKn membutuhkan perencanaan pembelajaran yang penuh kehati-hatian, sebab ini menyangkut karakter,” ujar Prof. Zulaecha. Menurutnya,

pembelajaran PPKn tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga bagaimana membentuk civic disposition atau watak kewarganegaraan siswa. Aspek tersebut mencakup karakter privat dan karakter publik yang perlu dikembangkan secara terencana dalam proses pembelajaran.

“Civic disposition yang memuat unsur karakter privat dan karakter publik sangat penting untuk dikembangkan. Penelitian ini juga didukung guru-guru yang terlibat di 16 sekolah, mulai dari tahap praobservasi hingga pengembangan model,” jelasnya.

Dalam penelitian tersebut, tim juga melibatkan sejumlah anggota dengan keahlian masing-masing. Di antaranya Dr. Rasid Yunus, S.Pd., M.Pd., yang memiliki kompetensi di bidang PPKn, pendidikan karakter dan etnopedagogi.

Kemudian Arif Dwinanto yang berkompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak. Prof. Zulaecha sendiri memiliki kompetensi pada bidang manajemen, perencanaan pembelajaran, Civic Education, Educational Technology dan Educational Management.

Sejumlah mahasiswa juga dilibatkan sebagai tim pendukung penelitian. Safrin Lamusrin membantu pengumpulan data lapangan, pendampingan pembelajaran dan dokumentasi. Abdul Muin Saleh mendukung administrasi, perizinan, observasi dan wawancara. Sementara Amelisa Paputungan membantu pengumpulan instrumen, pencatatan data lapangan dan dokumentasi.

Prof. Zulaecha turut mengapresiasi dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo serta guru-guru dari 16 SMP Negeri yang

terlibat dalam penelitian.

Salah seorang guru PPKn peserta FGD menyambut positif model yang dikembangkan. Menurutnya, penyusunan modul dan perangkat pembelajaran selama ini menjadi salah satu tantangan dalam proses pembelajaran. “Kami sangat terbantu dengan adanya ini. Kendala kami saat ini juga berkaitan dengan modul, bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran PPKn yang benar-benar adaptif dan sesuai kebutuhan siswa,” ungkapnya.

Ia menilai integrasi modul dengan teknologi memberikan langkah yang lebih jelas bagi guru dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran.

Sementara itu, E-Civic Adaptif dirancang sebagai ekosistem pembelajaran yang menggabungkan modul ajar dengan platform digital. (Tr-76)

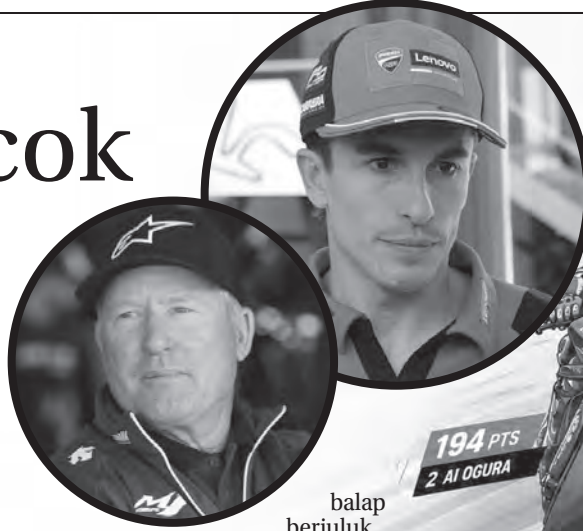
■ Legenda MotoGP :

Marquez Tak Cocok dengan Ducati

LEGENDA MotoGP Kenny Roberts menilai Marc Marquez belum cocok dengan motor balapnya saat ini, Ducati. Meski Ducati telah membantu Marquez meraih gelar juara dunia musim lalu, Kenny menilai Marquez tetap membutuhkan motor yang dikembangkan secara khusus untuk mengakomodasi gaya balap agresifnya. "Saya suka Marquez, karena dia sangat agresif. Dia mungkin pebalap yang paling sering saya ikuti. Saya tidak suka semua kesalahan yang dia buat, tapi itu bagian dari sifat agresifnya," ujar Roberts dikutip dari GPOne, Selasa

(25/8) kemarin. Meski demikian, Roberts melihat Marquez belum benar-benar nyaman dengan motor yang digunakannya saat ini. Hal itu berbeda ketika Marquez masih membela Honda pada periode awal kariernya di MotoGP.

"Dia tidak pernah terlihat benar-benar nyaman dengan motor ini, tidak seperti saat dia mengendarai Honda di tahun-tahun awal. Gaya berkendara berbeda dari yang lain dan saya rasa dia membutuhkan motor yang dirancang khusus untuk gaya tersebut. Saya rasa saat ini dia belum memilikinya," lanjut legenda



King Kenny itu. Tapi Roberts menilai persoalan ini bukan sesuatu yang asing bagi seorang rider. Dia pernah mengalami kondisi serupa ketika mengendarai Yamaha dengan posisi berkendara yang tidak sesuai dengan postur tubuhnya. (net)



Liga Eropa 2026/2027

La Liga Jadi Pembuka

MUSIM BARU lima liga top Eropa—La Liga, PremierLeague, Ligue 1, Serie A, dan Bundesliga—segera dimulai, dengan La Liga menjadi yang pertama bertanding. Pertandingan pembuka menyajikan duel antara Deportivo Alaves dan Getafe di Estadio de Mendizorrosa, sementara empat raksasa Spanyol—Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, dan Real Betis—mendapat jeda khusus karena menyumbang banyak pemain ke semifinal Piala Dunia 2026.

Liga Inggris menyusul pada Sabtu, 22/8) kemarin, dengan Arsenal sebagai juara bertahan menjamu tim promosi Coventry City di Emirates Stadium. Sebelum liga dimulai, Arsenal terlebih dahulu bertemu Manchester City dalam Community Shield di Principality Stadium, Cardiff, pada Minggu, 16 Agustus.

Bundesliga menjadi liga terakhir yang bergulir, pada Minggu, (29/8) mendatang, dengan Bayern Munich menjamu VfB Stuttgart di Allianz Arena. Sebelum liga dimulai, Bayern terlebih dahulu bertanding dalam Piala Super Jerman melawan Borussia Dortmund pada Minggu, (23/8) kemarin. (net)



Harapan terakhir Indonesia Amri/Nita akhirnya terhenti dan hanya mampu rebut medali Perunggu di kejuaraan dunia 2026

Indonesia Kembali Gagal di Kejuaraan Dunia Alarm Jelang Asian Games 2026

Indonesia harus mengakhiri perjalanan di Kejuaraan Dunia 2026 tanpa wakil di partai puncak.

Harapan terakhir Merah Putih berada di pundak Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. Namun, langkah ganda campuran ranking 15 dunia tersebut terhenti di semifinal.

Pencapaian itu menjadi kabar positif karena nomor ganda campuran Indonesia kembali naik podium Kejuaraan Dunia setelah terakhir melakukannya pada 2017 melalui pasangan legendaris Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir. Yang menjadi perhatian

justu catatan Indonesia secara keseluruhan. Untuk kali kedua secara beruntun, tidak ada wakil Merah Putih yang mampu mencapai final Kejuaraan Dunia.

Catatan tersebut terakhir kali terjadi pada 2010 dan 2011. Artinya, Indonesia kembali menghadapi situasi serupa setelah 15 tahun silam.

Alarm untuk PBSI

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi PBSI. Performa Indonesia di sejumlah turnamen besar memang sempat tertolong oleh Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri,

termasuk ketika meraih gelar di China Open dan Japan Open. Namun, di panggung Kejuaraan Dunia, Indonesia kembali gagal mengirimkan wakil ke partai perebutan gelar.

Persoalan tersebut makin penting karena Asian Games 2026 sudah menanti. Ajang olahraga terbesar di Asia itu akan berlangsung di Jepang pada (19-1/10). Waktu yang tersisa bahkan kurang dari satu bulan. PBSI pun memiliki ruang yang terbatas untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki berbagai kekurangan sebelum para pebulu tangkis Indonesia kembali turun di ajang multi-event. (net)

Polres Pohuwato Tangkap Enam Warga



Barang bukti peredaran narkotika berhasil disita oleh Satuan Narkoba Polres Pohuwato.

Terkait Peredaran Narkoba, Salah Satu Berasal Dari Sulteng

POHUWATO-GP - Personel Satuan Narkoba mengamankan kurang lebih enam orang warga. Mereka diamankan lantaran kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Data yang dirangkum Gorontalo Post, pengungkapan pertama dilakukan pada Jumat (14/8) di Desa Sipatana, Kecamatan Duhiadaa, sekitar pukul 13.30 Wita. Pada saat itu, pihak personel Satuan Narkoba Polres Pohuwato mengamankan seorang laki-laki bernama DG (33), warga Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kapolres Pohuwato AKBP H. Busroni, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba IPTU Budi Abdul Gani, S.H. mengatakan, pengungkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima petugas terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Marisa.

“Setelah menerima informasi, tim melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas dan keberadaan yang bersangkutan,” ujar

IPTU Budi.

Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian mengamankan DG di Desa Sipatana, Kecamatan Duhiadaa. Saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi yang disaksikan aparat desa setempat, petugas menemukan sebuah bungkusan lakban warna hitam yang disembunyikan diantara tumpukan sampah di pinggir jalan trans Desa Sipatana. Setelah dibuka, bungkusan tersebut berisi satu sachet plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat satu sachet plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu.

“Yang bersangkutan mengakui bahwa barang yang ditemukan tersebut merupakan miliknya dan disembunyikan setelah turun dari mobil rental yang ditumpanginya dari Sulawesi Tengah,” jelas mantan Kapolsek Lemito ini.

Kepada petugas, DG juga mengaku memperoleh barang tersebut dari seseorang berinisial DO yang berada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dengan harga Rp2.500.000. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan satu sachet plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, satu sachet plastik klip sedang kosong,

serta satu bungkusan lakban warna hitam. Hasil pemeriksaan urine terhadap DG menunjukkan hasil positif amphetamine dan methamphetamine.

“Terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Pohuwato untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut” paparnya.

Tak hanya sampai di situ saja, personel Satuan Narkoba Polres Pohuwato kembali mengamankan lima orang warga, yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu pada Sabtu (15/8), di wilayah Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato.

Dijelaskan Kasat Narkoba, Iptu Budi Abdul Gani, S.H., penangkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima petugas terkait adanya sejumlah orang yang diduga membawa narkotika jenis sabu menuju wilayah Kabupaten Pohuwato. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu sachet plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam kendaraan yang digunakan para terduga. Selain itu, Polisi turut mengamankan empat unit telepon seluler dan satu unit mobil Toyota Avanza beserta dokumen kendaraan. Petugas juga melakukan pemeriksaan urine terhadap kelima orang yang diamankan. Hasilnya, empat orang terindikasi positif amphetamine dan methamphetamine, sementara satu orang lainnya menunjukkan hasil negatif. “Barang bukti dan Kelima orang beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Pohuwato untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut,” jelasnya. Dengan adanya pengungkapan ini, pihak Polres Pohuwato menegaskan komitmennya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkotika.

“Kami pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu, dan melaporkan informasi peredaran narkotika yang ada di Gorontalo, khususnya di Pohuwato. Bagi siapa saja yang mengetahui, agar dapat segera melapor, sehingga dapat kami tindaklanjuti.

Terkait dengan pengungkapan ini, nanti akan kami informasikan kembali perkembangannya,” pungkasnya. (kif)



Aparat Kepolisian berhasil menyita puluhan botol Minuman Keras (Miras) dari kios dan juga rumah masyarakat.

Polisi Sita Puluhan Botol Miras

GORONTALO-GP - Aparat Kepolisian kembali menyita puluhan botol minuman keras (Miras) dari sejumlah tempat penjualan milik masyarakat.

Informasi yang dirangkum Gorontalo Post, pengungkapan peredaran Miras di Gorontalo dilakukan oleh sejumlah Polres, diantaranya Polres Gorontalo. Menindaklanjuti informasi serta keresahan dari masyarakat, Satuan Narkoba Polres Gorontalo mendatangi sebuah rumah milik masyarakat yang diduga memperjualbelikan Miras di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Senin (24/08/2026) malam.

Operasi itu dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Gorontalo, Ipda Suleman T. Dinti, S.H., atas instruksi Kasat Resnarkoba Iptu Rudianto Simbala, S.H. Tim Opsnal bergerak dari Mako Polres Gorontalo pada pukul 18.00 Wita menuju lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat. Tim pun tiba di lokasi sasaran pada pukul 18.45 wita, dan langsung melakukan pemeriksaan di rumah milik seorang warga berinisial Ibu A. Dari hasil pengeledahan, petugas berhasil menemukan dan menyita puluhan botol Miras siap edar dari berbagai jenis. Diantaranya, 10 botol Miras jenis Cap Tikus ukuran 600 mililiter, 13 botol Miras jenis Bir Bintang ukuran 620 mililiter dan 15 botol Miras jenis Kasegaran ukuran 620 mililiter.

Seluruh barang bukti itu kemudian diamankan oleh petugas untuk dibawa ke Mako Polres Gorontalo guna proses penyelidikan lebih lanjut. Operasi penindakan ini merupakan komitmen nyata Polres Gorontalo dalam memberantas penyakit masyarakat (Pekat), seperti peredaran Miras, kepemilikan senjata tajam (Sajam), premanisme, perjudian, prostitusi, hingga penyalahgunaan narkoba. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memberikan rasa aman yang optimal bagi warga Kabupaten Gorontalo.

Kapolres Gorontalo melalui Kasat Narkoba, Iptu Rudi menyampaikan, apresiasi kepada warga yang telah peduli dan berani melaporkan adanya aktifitas jual beli minuman beralkohol.

“Informasi dari warga adalah kunci

utama kami dalam memetakan dan memberantas peredaran barang haram ini,” ucap Kasat Resnarkoba.

Ditegaskan pula, Miras merupakan salah satu pemicu utama terjadinya berbagai tindak kriminalitas dan gangguan kamtibmas di tengah masyarakat. Olehnya itu, pihaknya akan terus mengencangkan operasi penertiban penyakit masyarakat ini, terutama sebagai langkahantisipasi dini dalam menekan potensi gangguan keamanan menjelang akhir tahun.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjauhi aktivitas ilegal ini dan bersama-sama menjaga wilayah hukum Polres Gorontalo agar tetap aman, nyaman, dan kondusif” harapnya.

Pelaksanaan operasi yang sama dilakukan oleh personel Polres Pohuwato. Piket fungsi yang dipimpin oleh Pawas Polres Pohuwato, AKP I Ketut Suka, S. IP bersama Pamapta 2, Ipda Yayan Setyawan, S.H., menasar sejumlah kios yang menjual Miras di wilayah Kecamatan Buntulia, Senin (24/8/2026) sekitar pukul 21.30 Wita. Dalam patroli tersebut, personel menyambangi sejumlah kios di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia. Dari hasil operasi itu, petugas menemukan sejumlah Miras yang diperjualbelikan. Diantaranya, empat botol bir, dua botol Kasegaran, dua botol Pinarachi, 16 botol Cap Tikus ukuran 600 mililiter, lima bungkus plastik ukuran 600 mililiter, serta 26 botol Hemaviton berisi Cap Tikus ukuran 150 mililiter.

Kapolres Pohuwato, AKBP H. Busroni, S.I.K., M.H. melalui AKP I Ketut Suka, S.I.P. mengatakan, kegiatan patroli tersebut dilaksanakan sebagai upaya menekan peredaran Miras yang berpotensi memicu gangguan Kamtibmas dan tindak kriminalitas.

“Patroli ini dilaksanakan guna menekan peredaran minuman keras yang berpotensi memicu gangguan Kamtibmas dan ketertiban di tengah masyarakat. Konsumsi Miras juga dapat menjadi salah satu pemicu berbagai tindak kriminalitas, seperti penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kenakalan remaja, hingga kecelakaan lalu lintas,” kata mantan Kasat Intelkam Polres Pohuwato ini.

Dalam kegiatan tersebut, personel juga memberikan imbauan kepada para pemilik kios agar tidak lagi menjual Miras. (kif)

Residivis Pencurian Kembali Dibekuk

GORONTALO-GP - Residivis kasus dugaan pencurian, kembali dibekuk. Berkat gerak cepat Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Ditreskrim Polda Gorontalo, lelaki berinisial IS (28) berhasil diamankan di wilayah Kota Gorontalo. Informasi yang dirangkum Gorontalo Post, penangkapan dilakukan pada Minggu (22/8) sekitar pukul 11.00 Wita. Awalnya Tim URC mendapat informasi dari masyarakat, di mana terduga pelaku sedang berada di depan salah satu toko di Kota Gorontalo. Menindaklanjuti informasi itu, Tim URC langsung bergerak menuju lokasi dan mengamankan IS tanpa perlawanan.

Terduga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Telaga Biru untuk menjalani pemeriksaan awal. Dari hasil interogasi, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan sejumlah barang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Tim selanjutnya melakukan

pengembangan hingga ke wilayah Kota Gorontalo. Dari pengembangan tersebut, Polisi berhasil menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti. Diantaranya, dua unit handphone, dompet, kartu BPJS, kartu ATM, KTP, SIM C, Kartu Keluarga Sejahtera, kartu pasien Puskesmas Telaga Biru, serta satu botol parfum.

Kapolda Gorontalo melalui Dirreskrim, Kombes Pol. Teddy Rachesna, S.H., S.I.K., M.Si mengatakan, kasus tersebut berawal ketika korban mendapati sejumlah barang miliknya hilang, setelah sebelumnya meninggalkan kendaraan yang berada tidak jauh dari rumah. Barang yang hilang di antaranya dua unit handphone serta sejumlah dokumen dan kartu penting. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 10,7 juta. “Dari hasil pemeriksaan, IS diketahui pernah berhadapan dengan hukum dalam sejumlah

perkara sebelumnya. Catatan kepolisian menyebutkan, yang bersangkutan pernah terlibat kasus Curanmor pada 2014, pencurian handphone pada 2015, serta perkara narkoba pada 2016,” jelasnya.

Terduga pelaku juga mengakui perbuatannya. Selanjutnya, pada pukul 16.00 WITA, IS beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Jatanras Ditreskrim Polda Gorontalo untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

“Penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya Kepolisian dalam memberikan respon cepat terhadap laporan masyarakat, serta mengungkap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Gorontalo. Untuk selanjutnya, kami pun masih akan melakukan pendalaman terhadap pengungkapan ini. Perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan kembali,” pungkasnya. (kif)



Seorang residivis kejahatan berhasil dibekuk oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Ditreskrim Polda Gorontalo.

TGR dalam Inovasi Daerah

MINGGU II Agustus 2026 saya mengikuti job fit (ujian kompetensi & evaluasi kinerja) JPT pratama kabupaten gorontalo, diikuti 35-1 peserta. Peserta wajib menulis makalah & wawancara seputar tusi & apa yang telah & akan dilakukan termasuk inovasi & mengikuti psikometri. Inovasi, saya mengangkat “Data TGR”. Tema ini beralasan untuk diangkat. Banyak rekomendasi di LHP BPK/Inspektorat menjadi objek penyelidikan & penyidikan hingga persidangan TIPIKOR yang semestinya dapat diselesaikan via TGR (tuntutan ganti rugi) atau penggantian kerugian negara *bukan* pengembalian kerugian negara.

M e n j a d i o b j e k penyelidikan hingga persidangan TIPIKOR akibat Inspektorat (sekretariat TGR), PPKD (pejabat penyelesaian kerugian daerah), TPKD (tim penyelesaian kerugian daerah) & MPPKD (majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah): (a). tak melaksanakan proses TGR sama sekali. (b). melaksanakan TGR tapi tak tuntas. (c). melaksanakan TGR tapi tak sesuai prosedur/ tata cara (melewati jangka waktu & dilakukan oleh bukan lembaga TGR). (d). tanpa SKTJM (surat keterangan tanggung jawab mutlak, SKP2KS (surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara)/SKP2K (surat keputusan pembebanan penggantian kerugian).

Alasan lainnya, sangat mudah publik mengakses LHP BPK yang memuat rekomendasi potensi/ kerugian negara, dengan KTP publik bisa mengakses layanan e-PPID BPK atau website <https://gorontalo-ppid.bpk.go.id/>. Efeknya akan digunakan & menjadi bahan laporan publik ke APH.

Atas akibat ini, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo beberapa pejabat daerah eselon II & III telah divonis bersalah & pimpinan/anggota DPRD berproses penyidikan & menanti persidangan.

PROSES TGR

Setiap rekomendasi LHP BPK/ Inspektorat berpotensi atau merugikan keuangan negara wajib diproses TGR sebagai upaya pemulihan kerugian negara via TGR (penggantian kerugian negara), bukan pengembalian kerugian negara. Proses TGR harus via prosedur/ tata cara oleh lembaga (atasan langsung, PPKD, TPKD, MPPKD), berjangka waktu & dibuat/ ditetapkan via surat administrasi (SKTJM, SKP2KS, SKP2K) hingga tuntas.

Proses TGR diawali prosedur/ tata cara oleh lembaga atasan langsung sejak diterimnya informasi kerugian negara (LHP BPK/Inspektorat) dengan memverifikasi indikasi kerugian negara. Hasil verifikasi dilaporkan kepada KADA maksimal 4 hari kerja (HK) sejak diterimanya LHP BPK/Inspektorat.

KADA/Kaban Keuangan selaku PPKD membentuk TPKD maksimal

7 HK sejak diterimanya laporan hasil verifikasi & TPKD menyelesaikan pemeriksaan kerugian maksimal 7 HK sejak dibentuk. LHP sementara TPKD beserta dokumen pendukung disampaikan ke pihak yang merugikan untuk ditanggapi maksimal 2 HK setelah penugasan usai. Tanggapan disampaikan ke TPKD maksimal 14 HK sejak LHP sementara diterima. Jika hingga batas waktu 14 HK tak ada tanggapan, dianggap tak ada keberatan. TPKD menjawab tanggapan maksimal 2 HK sejak tanggapan diterima. Jika diterima, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan & jika tanggapan ditolak, tanggapan dilampirkan di hasil pemeriksaan. Selanjutnya, LHP TPKD disampaikan ke PPKD maksimal 3 HK sejak diterimanya tanggapan atau batas 14 HK tak ada keberatan. LHP TPKD berupa pernyataan kerugian negara disebabkan: (a). perbuatan melanggar hukum/ lalai; atau (b), bukan perbuatan melanggar hukum/ lalai.

Sesuai LHP TPKD, PPKD memberikan pendapat: menyetujui atau menolak LHP. Jika PPKD menolak dilakukan pemeriksaan ulang atas materi yang ditolak maksimal 3 HK & disampaikan kembali ke PPKD. Jika PPKD menyetujui, PPKD segera menugaskan TPKD melakukan TGR. Jika pihak yg merugikan melarikan diri, meninggalkan dunia atau dalam pemgampuan TGR beralih ke pengampu, ahli waris/ yg berhak. Dalam proses TGR, TPKD mengupayakan SKTJM dari pihak yg merugikan. SKTJM berisi: identitas, jumlah kerugian, barang/ sertifikat yg dijaminakan & surat kuasa menjual, dsb & dibuat maksimal 3 HK sejak diterimanya surat penugasan.

SKTJM mengganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum maksimal 90 hari & akibat kelalaian maksimal 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani tunai/ angsuran. SKTJM akibat kelalaian dapat diperpanjang melalui PPKD & diajukan maksimal 1 bulan sebelum jatuh tempo & ditetapkan dengan Keputusan KADA. PPKD memberikan pertimbangan ke KADA atas permohonan perpanjangan maksimal 5 HK setelah permohonan diterima, dengan alasan: (a). keadaan kahar. (b). sakit dengan bukti surat keterangan dokter/ rumah sakit. (c). kondisi ekonomi dengan bukti surat keterangan instansi terkait.

Jika SKTJM tak diperoleh TPKD melaporkan ke PPKD. PPKD menerbitkan SKP2KS maksimal 7 HK setelah menerima laporan. SKP2KS berisi, identitas, jumlah kerugian, cara & jangka waktu bayar & daftar harta kekayaan (barang/ sertifikat). PPKD menyampaikan SKP2KS ke pihak yg merugikan maksimal 3 HK sejak SKP2KS ditandatangani dibuktikan dengan tanda terima. Jika tanda terima tak ditandatangani dibuatkan berita acara yang ditandatangani Ketua TPKD & PPKD. Pembayaran penggantian kerugian maksimal 90 hari sejak



Oleh :
Dr. Yusran Lapananda, SH., MH.

diterbitkannya SKP2KS secara tunai.

SKP2KS mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan diajukan KADA ke instansi pengurusan piutang negara. Pihak yg merugikan/ ahli waris dsb dapat menerima atau keberatan atas SKP2KS maksimal 14 HK sejak diterimanya SKP2KS. Keberatan secara tertulis ke PPKD disertai bukti. Keberatan tak menunda mengganti kerugian.

Jika proses TGR dilakukan oleh PPKD/KADA membentuk TPKD berkenaan dengan kerugian negara akibat perbuatan melanggar hukum/ lalai, maka PPKD/KADA membentuk MPPKD memproses TGR jika: (a). kerugian negara *bukan* perbuatan melanggar hukum/ lalai. (b). wanprestasi (pihak yg merugikan melewati batas waktu pembayaran atas SKTJM (90 hari/24 bulan). (c). pihak yg merugikan menerima/ keberatan atas terbitnya SKP2KS. Majelis/MPPKD dalam memeriksa & memberi pertimbangan ke PPKD dilakukan melalui sidang & putusan hasil sidang.

Jika hasil sidang MPPKD kerugian negara bukan perbuatan melanggar hukum/ lalai putusannya penghapusan yg disampaikan ke PPKD. Jika hasil sidang MPPKD kerugian negara terbukti akibat perbuatan melanggar hukum/ lalai dilakukan pemeriksaan kembali oleh TPKD melalui PPKD. Hasil pemeriksaan kembali disampaikan ke TPKD melalui PPKD dalam putusan kerugian bukan perbuatan melanggar hukum/ lalai atau kerugian akibat perbuatan melanggar hukum/ lalai. Jika MPPKD menyetujui kerugian akibat perbuatan melanggar hukum/ lalai PPKD menindaklanjuti proses SKTJM & SKP2KS. Jika menyetujui kerugian bukan akibat perbuatan melanggar hukum/ lalai MPPKD menetapkan putusan penghapusan yg disampaikan ke PPKD.

Jika hasil sidang MPPKD oleh karena *wanprestasi*, putusan MPKKD adalah pertimbangan penerbitan SKP2K disampaikan ke PPKD. SKP2K diterbitkan maksimal 14 HK sejak MPPKD menetapkan putusan.

Jika hasil sidang MPPKD oleh karena pihak yg merugikan menerima SKP2KS MPPKD memutuskan & menerbitkan SKP2K. Jika pihak yg merugikan keberatan

& MPPKD beroleh cukup bukti memutuskan: menolak/ menerima seluruhnya atau menolak/ menerima sebagian. Jika putusan MPPKD menolak seluruhnya atau menolak/ menerima sebagian MPPKD menyampaikan pertimbangan ke PPKD menerbitkan SKP2K. Jika MPPKD menerima seluruhnya MPPKD menyampaikan pertimbangan ke PPKD untuk penghapusan atau pembebasan ganti rugi menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara.

INOVASI TGR

Saat ini mudah bagi publik mendapatkan LHP BPK via website. Pemda harus beradu cepat untuk menyelesaikan setiap rekomendasi potensi/ kerugian negara via proses TGR. Jika terlambat/ tak tepat waktu atau tak tuntas melaksanakan TGR akan disalip dengan penyelidikan & penyidikan.

Belajar dari berbagai kasus TIPIKOR, terdapat objek penyelidikan/ penyidikan & persidangan atas potensi/ kerugian negara pada rekomendasi BPK. Selain itu lembaga: Inspektorat selaku sekretariat, atasan langsung, PPKD, TPKD & MPPKD: (a). tak melaksanakan proses TGR sama sekali. (b). melaksanakan TGR tapi tak tuntas. (c). melaksanakan TGR tapi tak sesuai prosedur/ tata cara (melewati jangka waktu & dilakukan oleh bukan lembaga TGR). (d). tak ada SKTJM, SKP2KS/ SKP2K.

Hal ini akibat dari Inspektorat & lembaga TGR tak memahami/ mengetahui proses TGR hingga abai & lalai dalam menyelesaikan potensi/ kerugian negara via TGR yang diatur dalam PP 38/2016 jo PMDN 133/2018 & Perkada masing-masing daerah, akibatnya pihak-pihak yang dirugikan.

Dari pemikiran ini, dilahirkan inovasi TGR dalam bentuk aplikasi TGR baik via seluler/web. Aplikasi ini dibuat semudah mungkin dalam penerapannya dalam memproses TGR. Aplikasi memuat proses TGR dari diterimanya LHP BPK/ Inspektorat hingga penagihan, penyetoran, penatausahaan, akuntansi & pelaporan, serta pengapusan piutang TGR disertai dengan Pasal-Pasal yang mengatur, jangka waktu, lembaga TGR & surat administrasi.

Aplikasi ini berguna bagi Inspektur, Atasan Langsung, PPKD, TPKD & MPKD terutama Sekretariat TGR: (a). tak berkesempatan membaca atau tak membaca sama sekali. (b). tak paham/ mengerti makna TGR. (c). tak mengetahui proses TGR yang diatur dalam PP 38/2016 jo PMDN 133/2018 & Perkada masing-masing daerah hingga bingung dalam penerapan proses TGR.

Aplikasi TGR ini hanya dapat diakses totalitas oleh: BPK & Inspektur, PPKD, TPKD, MPPKD & Sekretariat TGR. Sedangkan atasan langsung & pihak yang merugikan hanya bisa mengakses sebatas hasil rekomendasi & proses TGR yang

bersangkutan saja.

Bagi pihak yang merugikan, aplikasi ini memudahkan untuk mengetahui: (a). tata cara/ prosedur TGR. (b). jangka waktu TGR. (c). lembaga TGR. (d). surat administrasi TGR. (e). terlebih mendapatkan hak-haknya seperti: (a). menanggapi LHP sementara TPKD. (b). Laporan TPKD (kategori perbuatan/ jenis objek kerugian negara, jumlah kerugian & rekomendasi. (c). SKTJM (jumlah & jangka waktu penyetoran). (d). SKP2KS/ SKP2K. (e). putusan MPKD. (f). surat tagihan & bukti setoran. (g). hak lainnya.

Bagi Sekretariat TGR (TPKD/ MPKD) aplikasi ini berguna dalam melakukan proses TGR, sebagai pedoman & panduan atas tata cara/ prosedur, jangka waktu TGR & jatuh tempo, tahapan lembaga TGR. Penerapan surat administrasi TGR (laporan TPKD, tanggapan, SKTJM, SKP2KS/ SKP2K, putusan MPPKD, penagihan, penyetoran, penatausahaan, akuntansi & pelaporan, serta pengapusan piutang TGR.

Aplikasi ini menjadi bagian penting dalam membantu BPK dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terutama penggantian kerugian negara. Terlebih dalam pelaporan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian semesteran/ tahunan sebagaimana amanat UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dengan aplikasi ini, TGR tuntas & terpenting para ASN & pejabat daerah termasuk kades- kades yang terlibat dalam rekomendasi BPK/ Inspektorat tak terpenjara (penyelidikan, penyidikan & persidangan) TIPIKOR akibat ulah, abai/ lalainya Inspektorat, Atasan Langsung, PPKD, TPKD & MPKD terutama Sekretariat TGR dalam memproses TGR.

PENUTUP

Jika Inovasi TGR ini dibuat & diterapkan diyakini siapapun & apapun kompetensi PPKD, TPKD, MPPKD, Inspektur & Sekretariat TGR akan terbantu dalam menyelesaikan TGR hingga tuntas & tak ada lagi pejabat daerah (PNS/ DPRD) terjerat kasus TIPIKOR dari LHP BPK/ inspektorat.

Jika dikelola secara profesional dalam penerapannya bukan tak mungkin bisa ikut kompetisi TOP KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) KEMENPANRB yang digelar tiap tahun. Inovasi ini akan mengulang kembali Inovasi MPTGR yang tembus TOP 40 KIPP 2017 termasuk berkontribusi pada penilaian totalitas Inovasi Daerah KEMENDAGRI.

Selain itu, daerah berinovasi memberi nilai kepercayaan kementerian/ lembaga dalam pemberian anggaran belanja & publik menilai pemerintahan daerah & ASN berkinerja. (*)

Penulis adalah PNS JPT Pratama

DIVISI PRODUKSI

Redaktur Pelaksana: Roy Tilameo, Rahmat Malik.
Redaktur: Zulkifli Tampolo. **Staf Redaksi**: Deice Pomalingo, Caisar Ntoma, Diyanti T. Niyode, **Sekretaris Redaksi/HRD**: Chicilia Noviastruti Arifin. **IT**: Luki

DIVISI ART & PERWAJAHAN

Risdianto Karim, Nasir Hantono, Apri Ahmad. **Design Grafis**: Muhammad Syukri

DIVISI USAHA

Manager Keuangan: Elvin Ambo. **Adriyanti Kadir (adm)**. **Manager Iklan**: Hariyanto Hamzah.

Staf Iklan: Aminum Humola, Surya Muhamad **Design Iklan**: Oman Nasiboe.

Manager Sirkulasi & Pemasaran: Yusuf Saleh. **Pemasaran Koran**: Buyung Tanjung, Yersi Ismail, Welniaty Ahaya (adm).

LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN

Tarif Iklan: Umum Rp. 30.000,-/mmk (hitam putih/BW), Rp 40.000,-mmk (berwarna/FC). **Mungil**: Rp 35.000 (satu kali muat). **Advertorial**: Rp 22.500,-mmk (berwarna), Rp 15.000,-mmk (hitam putih/BW). **Harga Langganan Koran**: Rp 150.000 (luar kota tambah ongkos kirim)

ALAMAT

Kantor Pusat: GEDUNG GRAHA PENA GORONTALO
Jln. Jhon A. Katili (Eks Jln. Andalas). No. 144 Kota Gorontalo. Telepon: (0435) 827551.
E-mail Redaksi: redaksi_gp@yahoo.com, redaksi.gpost@gmail.com, Hargo.co.id.
E-mail Iklan: iklan_gp@yahoo.com, iklangp@yahoo.com. E-mail Sirkulasi & Pemasaran: marketing_gp@ymail.com.

Perwakilan Jakarta: Jln. Kebayoran Lama no. 12 Jakarta Barat.
Surabaya: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Program Muaranya pada Kepentingan Rakyat

TILONGKABILA-GP-Menempuh kebijakan sangat dibutuhkan sinergi yang kuat dari peran kerja sama yang baik antara dua penyelenggara pemerintahan.

Ini penting demi terwujudnya koordinasi yang matang menuju arah pembangunan Bonbol yang maju dan berkembang pesat.

Apalagi dalam setiap mewujudkan gagasan program maka tentunya, tujuan dari bersinergi itu supaya semua gagasan program bermuara pada kepentingan rakyat.

Karena itu adeg Andris Makmur selalu yakin dan percaya dengan program dan kebijakan pemma sepanjang selama program itu dirasa untuk kepentingan rakyat "Perlu diupayakan dengan sinergi antara lembaga penyelenggara pemerintahan.

Membangun dan menjaga komunikasi dalam setiap mewujudkan gagasan program yang muaranya pada kepentingan rakyat, "Support adeg Andris Makmur belum lama ini.(csr)

Kepastian Masih 'KJ', DPRD Agendakan Panggil Presdir GM

Pertanyakan Keseriusan GM Kapan Bisa Segera Mulai Berproduksi

TILONGKABILA-GP — Kabar soal rencana produksi Gorontalo Minerals (GM) kembali menjadi perhatian DPRD Bone Bolango. Dewan mempertanyakan sejauh mana progres perusahaan tersebut dan kapan mulai merealisasikan kegiatan produksinya.

Ketua DPRD Bone Bolango, Faisal Yunus, mengatakan pihaknya sebelumnya telah mengundang Presiden Direktur GM untuk mengikuti rapat guna mendapatkan

penjelasan langsung terkait perkembangan perusahaan.

Namun, dalam rapat yang digelar sebelumnya, pihak yang hadir hanya perwakilan GM yang berada di Gorontalo. Karena itu, DPRD meminta agar agenda pertemuan kembali dijadwalkan dengan menghadirkan Presiden Direktur sesuai pihak yang telah diundang.

"Substansi kita mengundang pihak perusahaan ini untuk mempertanyakan progres, sampai kapan perusahaan ini bisa memproduksi. Kalau ada masalah atau kendala di lapangan, kita ingin tahu supaya bisa dibantu," kata Faisal.

Menurutnya, DPRD ingin mendapatkan

gambaran yang jelas mengenai target produksi perusahaan, termasuk kendala yang menyebabkan produksi belum berjalan sesuai harapan.

Faisal menegaskan, undangan tersebut ditujukan kepada kantor GM di pusat agar persoalan perusahaan dapat diketahui dan ditangani langsung oleh pimpinan. DPRD berharap Presiden Direktur dapat hadir dalam agenda yang direncanakan kembali pada September mendatang.

"Kita minta lagi penjadwalan. Kalau bisa yang benar-benar Presiden Direktornya dihadirkan. Kalau September belum hadir, kita akan undang lagi sampai mereka datang," tegasnya.(csr)



(FOTO DOK) KETUA DPRD Bonbol Faisal Yunus menerima KUA PPAS 2027 yang diserahkan Bupati Ismet Mile saat paripurna pengantar belum lama ini

Pembahasan KUA-PPAS 2027 Molor

DPRD Masih Tunggu Pagu Indikatif

TILONGKABILA-GP — Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Bone Bolango Tahun Anggaran 2027 hingga memasuki pekan keempat Agustus belum juga rampung. Padahal, berdasarkan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019, kesepakatan KUA dan PPAS antara kepala daerah dan DPRD semestinya ditandatangani paling lambat pada minggu kedua Agustus. Namun, hingga kini tahapan tersebut belum selesai.

Ketua DPRD Bone Bolango, Faisal Yunus, mengatakan pembahasan baru menyelesaikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sementara dokumen PPAS belum dapat dibahas secara keseluruhan karena DPRD masih menunggu pagu indikatif untuk tahun anggaran 2027.

"Pada dasarnya kami masih on proses, masih menunggu pagu indikatif 2027. Karena ada evaluasi perubahan RKPD dari provinsi, sampai saat ini belum ada," kata Faisal. Menurutnya, dokumen pagu indikatif tersebut menjadi salah satu bahan penting bagi DPRD untuk melanjutkan pembahasan PPAS. Karena itu, keterlambatan dokumen tersebut turut memengaruhi penyelesaian pembahasan KUA-PPAS secara keseluruhan.

Faisal mengatakan DPRD masih mempelajari konsekuensi dari keterlambatan pembahasan yang telah melewati target minggu kedua Agustus tersebut, termasuk kemungkinan adanya sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. "Makanya kita masih pelajari. Ketika ada sanksinya apa, nanti kita pelajari. Ini sudah lewat minggu kedua bulan Agustus," ujarnya.(csr)

BUDI ARIE BICARA PERCEPATAN PEMILU

Gerindra Pilih Fokus Sukseskan Program Prabowo

JAKARTA - Juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyebut parpolnya fokus untuk menuntaskan program prorakyat Presiden RI Prabowo Subianto dan belum berbicara Pemilu 2029. Hal demikian dikatakan Sugiat menyikapi pernyataan Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi terkait percepatan pemilu dari jadwal semula pada 2029. "Kami fokus sukseskan program Pak Prabowo, tidak ada pembahasan untuk 2029, masih jauh untuk dibahas," kata Sugiat kepada awak media, Selasa (25/8).

Sugiat mengatakan Gerindra merasa langkah mengawal program Kepala Negara lebih penting ketimbang berbicara kontestasi politik. "Ya, yang kami fokuskan saat ini itu mengamankan dan mengawal program-program Pak Prabowo yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu. Sugiat mempersilakan seluruh pihak untuk mempertanyakan langsung maksud percepatan pemilu dari jadwal awal, yakni 2029 kepada Budi Arie. "Jadi terkait pernyataannya,

hanya Budi Arie yang tahu sendiri maksudnya apa, silakan ditanya ke yang bersangkutan, kami tidak terpengaruh dengan itu," kata dia. Sebelumnya, Budi Arie mengungkapkan insting politiknya terkait situasi politik tanah air, terkhusus pemilu. Hal itu diketahui dari sebuah video yang viral di social media atau sosmed, seperti yang dibagikan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dalam Instagram akun @dennyindrayana99. Budi Arie tampak berbicara soal percepatan pemilu dalam sebuah

dialog yang juga dihadiri Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan pemilu setiap lima tahunan bisa berubah dan meminta semua pihak mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Budi bahkan mengaku sudah membisikkan kepada Jokowi terkait potensi percepatan pemilu agar bisa mempersiapkan diri. "Pak, kok, insting saya ini lebih cepat dari 2029. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong Pemilu 2029, Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap

nggak?" kata Budi Arie membahas dialognya dengan Jokowi. Budi Arie mengatakan terjadi anomali-anomali dan variabel di masyarakat yang membuat semua elemen tidak hanya sekadar memikirkan skenario-skenario konvensional. Diakemudian mengungkit kejadian pada 1997 yang membuat pemilu dipercepat untuk selanjutnya dilakukan 1999. "Potensi itu bukan tidak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," kata Budi Arie. (jppn)



Wawali: Cinta Rasul Harus Dibuktikan Lewat Akhlak

GORONTALO - GP - Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Agung Baiturrahim, Kota Gorontalo, Senin (24/8/2026), menjadi pengingat bagi umat Islam agar kecintaan kepada Rasulullah tidak berhenti pada ucapan dan seremonial. Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, yang hadir mewakili Wali Kota Adhan Dambea, mengajak jamaah menjadikan momentum Maulid sebagai sarana memperkuat keimanan sekaligus memperbaiki akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Indra, keteladanan Rasulullah SAW harus hadir dalam perilaku umat, baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Ia menegaskan, memperbanyak shalawat dan memuji Rasulullah merupakan bentuk kecintaan yang baik. Namun, kecintaan tersebut harus dibarengi dengan upaya mengikuti sunnah dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW.

“Jangan sampai kita rajin bershalawat dan memuji Rasulullah, tetapi sunnahnya kita tinggalkan. Lisan kita bershalawat, tetapi akhlak kita tidak mencerminkan apa yang dicontohkan Rasulullah,” tegas Indra.

Ia mengajak jamaah bercermin pada sifat Rasulullah yang dikenal jujur, amanah, penyayang dan dermawan. Kejujuran, kata dia, harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan, sementara sifat penyayang diwujudkan dengan memperlakukan keluarga, tetangga dan masyarakat secara baik.

Begitu pula dengan kepedulian terhadap sesama. Menurut Indra, semangat berbagi dan bersedekah merupakan bagian dari keteladanan Rasulullah yang perlu terus dihidupkan. Di penghujung sambutannya, Indra menyampaikan apresiasi kepada panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI) dan Takmirul Masjid Agung Baiturrahim atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap Maulid Nabi 1448 H tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi menjadi momentum perubahan nyata bagi umat untuk memperbaiki ibadah, perilaku dan hubungan sosial. (adv)



Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel ketika memberikan sambutan pada kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Agung Baiturrahim, Kota Gorontalo, Senin (24/8/2026).

POSISI KAS DAERAH PER 23 AGUSTUS 2026

I	Posisi Saldo Kas BUD per 22 Agustus 2026	79.571.009.030,62
	Penerimaan Kas Daerah per 23 Agustus 2026	8.558.761,00
	Pengeluaran Kas Daerah per 23 Agustus 2026	-
II	Saldo Akhir per 23 Agustus 2026	79.579.567.791,62

Gorontalo, 22 Agustus 2026
PIL. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO
Ttd
MARWAN MURSIDI, S.Sos, MH

ADHAN WARNING DISIPLIN ASN

Absen Kegiatan, TPP Dipotong Dua Persen



Wawali Indra Gobel ketika melakukan Sidak di Puskesmas Kota Selatan, Senin (24/8/2026)

Pelayanan Puskesmas Harus Utamakan Kenyamanan Warga

GORONTALO - GP - Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, menyortir kualitas pelayanan di sejumlah puskesmas. Hal itu disampaikannya setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Puskesmas Kota Timur dan Puskesmas Kota Selatan, Senin (24/8/2026).

Dalam sidak tersebut, Indra menemukan masih adanya sejumlah hal yang perlu dibenahi, terutama menyangkut kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan kesehatan.

Menurut Indra, kualitas pelayanan tidak cukup hanya diukur dari kesiapan petugas. Masyarakat sebagai penerima layanan juga harus merasakan kenyamanan sejak pertama kali menginjakkan kaki di puskesmas.

“Dari sidak ini, saya melihat pelayanan masyarakat masih kurang maksimal, khususnya dalam membuat

masyarakat nyaman,” ujar Indra.

Ia menegaskan, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk itu, suasana pelayanan harus dirancang agar pasien merasa aman dan nyaman, termasuk ketika harus menunggu antrean. Indra bahkan mengingatkan agar kenyamanan petugas tidak berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang datang untuk mendapatkan pengobatan.

“Jangan sampai yang nyaman hanya petugasnya, sementara masyarakat yang datang berobat justru tidak nyaman,” tegasnya.

Sorotan Indra tidak berhenti pada kondisi ruang tunggu. Ia meminta seluruh aspek pelayanan ikut diperhatikan, mulai dari interaksi petugas dengan pasien,

pelayanan dokter, hingga pemanfaatan fasilitas dan peralatan kesehatan.

Menurutnya, temuan dalam sidak harus menjadi bahan evaluasi bersama dan segera ditindaklanjuti.

“Ke depan harus ada yang berubah. Banyak catatan dan ada pekerjaan rumah. Bukan kepala puskesmas saja, tetapi semua. Ini sebenarnya pekerjaan rumah kita,” katanya.

Indra menekankan peningkatan pelayanan merupakan tanggung jawab seluruh jajaran, bukan hanya pimpinan puskesmas. Pemerintah Kota Gorontalo, kata dia, berkewajiban memastikan fasilitas kesehatan milik pemerintah memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat.

“Saya hanya memastikan masyarakat terlayani dengan baik. Kalau tidak maksimal melayaninya, berarti kita yang salah,” pungkasnya. (adv)

GORONTALO - GP - Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea kembali menegaskan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), bukan hanya dalam menjalankan tugas di kantor, tetapi juga saat mengikuti berbagai agenda resmi pemerintah daerah.

Adhan bahkan menyiapkan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar dua persen bagi pejabat maupun ASN yang tidak menghadiri kegiatan Pemerintah Kota Gorontalo tanpa keterangan tertulis.

“Yang tidak menghadiri kegiatan pemerintah daerah tanpa keterangan tertulis akan dikenai pemotongan TPP sebesar dua persen. Ini berlaku untuk semua,” tegas Adhan saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bersama jajaran pejabat Pemkot Gorontalo di Aula Bhandayo Lo Yiladia (BLY), Ahad (23/8/2026).

Kebijakan tersebut disampaikan setelah Adhan menyortir masih rendahnya partisipasi sebagian pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah hingga ASN dalam sejumlah kegiatan pemerintah daerah.

Menurutnya, setiap agenda yang dilaksanakan Pemkot Gorontalo merupakan bagian dari program pemerintahan yang membutuhkan keterlibatan seluruh jajaran.

Ia menilai, kehadiran aparatur tidak semestinya dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif. Partisipasi dalam kegiatan pemerintah, kata Adhan, menjadi salah satu indikator keseriusan jajaran dalam mendukung program dan kebijakan daerah.

Sorotan itu turut



Adhan Dambea

berkaitan dengan rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Pemkot Gorontalo melalui program Wawasan Bulan Kebangsaan.

Berbagai kegiatan olahraga dan kesenian digelar dalam rangkaian tersebut. Namun, Adhan mengaku masih menemukan banyak pejabat dan ASN yang tidak hadir meski telah diberikan arahan.

Ia mencontohkan pertandingan bola basket yang berlangsung Ahad (23/8/2026). Adhan mengatakan dirinya telah menyampaikan langsung permintaan agar jajaran pemerintah daerah hadir menyaksikan kegiatan tersebut.

Bagi Adhan, ketidakpatuhan terhadap arahan pimpinan tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele.

Ia menilai hal tersebut dapat menggambarkan tingkat soliditas dan komitmen jajaran birokrasi dalam menjalankan pemerintahan.

“Dari sini saya sudah bisa melihat siapa-siapa yang serius mau bekerja dengan saya dan siapa-siapa yang hanya main-main dan bisanya cuma memuji-muji saya. Saya tidak gila pujian,” katanya.

Untuk itu, Adhan meminta seluruh jajaran Pemkot Gorontalo memperkuat kerja sama, disiplin, serta rasa tanggung jawab dalam setiap agenda pemerintahan. (adv)



CUMA DI AHASS
TEKNISINYA AHLI
SERVISNYA
BERGARANSI!

MARI JO KE AHASS
Berhambas Nyaman & Terpercaya

100% Kualitas Honda

Informasi :
Scan Me

Torung Honda

DAYA Adicipta
Wisesa
Member of Daya Group